

# **MENIMBANG ANTARA KEMANDIRIAN DAN KEADILAN PANGAN**

**Kompilasi Karya Nominasi  
dan Pemenang Penghargaan  
Liputan Media Terbaik tentang  
Isu Keadilan Pangan**

Penerbitan buku ini didukung oleh Oxfam. Semua pandangan dan pendapat dalam buku ini adalah pandangan dan pendapat para penulis serta tidak sekali-kali mencerminkan atau mewakili pendapat atau pandangan Oxfam.

# **MENIMBANG ANTARA KEMANDIRIAN DAN KEADILAN PANGAN**

**Kompilasi Karya Nominasi dan Pemenang Penghargaan  
Liputan Media Terbaik tentang Isu Keadilan Pangan**

## **Dewan Juri**

KATEGORI CETAK-ONLINE

Harry Surjadi, Jurnalis Senior

Tejo Wayu Jatmiko, ADS

Renjani Pusposari, AJI

Dini Widiastuti, OXFAM

KATEGORI FOTO

Ng Swan Ti, PannaFoto Institute

Arbain Rambey, Kompas

Rully Kesumah, Tempo

Andy Cipta Asmawati, OXFAM

## **Penyelaras Akhir:**

Bayu Wardhana

Febrina Galuh Permanasari

**Cetakan Pertama:** Juni 2016

**ISBN** 978-979-3530-31-4

## **Penerbit:**



**AJI INDONESIA**

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

Jl Kembang Raya No.6 Kwitang, Senen

Jakarta Pusat 10240

[www.aji.or.id](http://www.aji.or.id) 📞 @ajiiindo

## **Didukung oleh:**



# PENGANTAR

**P**eliputan media terkait isu keadilan pangan di Indonesia saat ini sangat kurang. Selain perhatian pengelola media terkait isu ini minim, kapasitas jurnalis untuk meliput juga kurang. Akibatnya, pembaca tidak mendapat informasi yang cukup komprehensif terkait persoalan pangan di Indonesia.

Salah satu upaya mendorong agar isu ini terus mendapat perhatian media adalah dengan mengadakan Penghargaan untuk Liputan Media Terbaik tentang Isu Keadilan Pangan. Ini adalah tahun kedua yang diselenggarakan AJI bersama Oxfam Indonesia. Kami gembira dan menyambut baik kerjasama dengan Oxfam Indonesia karena ini menunjukkan perhatian besar pada peningkatan mutu jurnalistik Indonesia dan mengapresiasi pada karya - karya yang ada.

Wajah jurnalisme Indonesia saat ini sedang mengalami transisi, terutama pergeseran platform dengan merebaknya media baru berbasis digital. Ini menjadi tantangan tersendiri, di saat era media cetak dan elektronik, keterbatasan halaman dan durasi waktu, seringkali dijadikan alasan sulitnya tayang karya jurnalistik yang mendalam. Namun di media baru, meskipun jumlah laman tidak terbatas, kecepatan menjadi tolok ukur, sehingga karya-karya jurnalistik mendalam menjadi prioritas ke sekian. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi insan jurnalis untuk membawa isu-isu penting seperti keadilan pangan ini, ke dalam rapat-rapat sidang redaksi.

Dari semua karya yang masuk pada tahun ini, secara kuantitatif relatif sama. Ada kenaikan jumlah karya di tulisan, khususnya dari media-media online. Persebaran mulai merata, meski sebagian besar dari karya-karya dari Jawa, mulai bermunculan penyumbang karya dari Sumatera dan Sulawesi. Topik yang diangkat, lebih bervariasi daripada tahun lalu, isu keadilan pangan pada liputan-liputan yang masuk, tidak melulu soal sawah dan beras, tetapi sudah mengangkat hal-hal lain seperti keamanan pangan, pangan alternatif dan lain lain.

Namun harus diakui bahwa pemahaman para jurnalis Indonesia tentang keadilan pangan masih sangat lemah. Ini terlihat dari karya yang masuk belum menulik mendalam ke persoalan-persoalan bagaimana hak petani untuk mengembangkan varietas bibit, hak konsumen untuk mengetahui sumbernya pangan, rantai perdagangan yang adil sampai bagaimana keanekaragaman pangan terjaga. Isu keadilan pangan memang masih jauh dari perhatian petinggi media massa di Indonesia. Sementara itu keadilan pangan ini adalah isu strategis bangsa ini jika dikaitkan dengan bonus demografi yang akan didapat pada tahun 2035 nanti. Ledakan jumlah penduduk produktif pada masa itu, akan sia-sia jika persoalan pangan generasi muda saat ini tidak diperhatikan. Bisa jadi bangsa ini hanya mendapatkan jumlah angkatan kerja yang besar, tapi kurang produktif karena gizi yang tidak cukup.

Harapan ke depan, isu keadilan pangan ini adalah pekerjaan rumah bagi media massa, untuk mendapatkan prioritas dan kedalaman. Sehingga media massa mampu memberikan pencerahan, edukasi ke masyarakat maupun pemerintah tentang pentingnya isu Keadilan Pangan ini. Semoga upaya Penghargaan Liputan Media Terbaik tentang Isu Keadilan Pangan ini tidak berhenti di sini, tetapi diikuti

upaya-upaya lain, dan makin banyak lembaga dan media massa yang terlibat. Dan AJI Indonesia akan selalu mendukung upaya-upaya ini.

Akhir kata, saya ucapkan selamat bagi para pemenang maupun nominator. Semoga terus berkarya dan terus memperdalam isu pangan. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Oxfam Indonesia, Mbak Dini Widiastuti dan tim atas dukungan selama ini, pengurus AJI Indonesia, teman-teman staf AJI Indonesia, Eva Danayanti, Febrina Galuh, Minda dan seluruh tim yang terlibat. Semoga kehadiran buku ini, dapat makin memperluas pemahaman kita tentang Keadilan Pangan.

Jakarta, 6 Juni 2016

**Suwarjono**  
Ketua Umum AJI Indonesia



# KATA PENGANTAR OXFAM

**G**ROW Award dan buku ini merupakan karya nyata kerjasama Oxfam dan AJI Indonesia, terutama dalam konteks GROW Campaign yang telah berjalan sejak tahun 2012, atau Kampanye Keadilan Pangan.

Media memegang peranan penting dalam memastikan demokrasi dan pembangunan. Ini merupakan sebuah peran yang diamini secara internasional, yang dalam prakteknya mungkin tidaklah selalu mudah. John Pilger, seorang jurnalis Australia ternama, menyatakan bahwa tidaklah cukup bagi jurnalis untuk menganggap diri mereka sebagai pengantar pesan (messenger) tanpa memiliki pemahaman tentang agenda dari pesan yang mereka sampaikan, serta mitos yang meliputinya.

Dalam kaitannya dengan pangan ada harapan bahwa jurnalis tidak hanya menampilkan informasi yang kasat mata atau data-data tak bermakna. Jurnalis seharusnya tidak berhenti di situ, melainkan menggali lebih dalam lagi latar belakang, agenda dan kepentingan-kepentingan yang terkait dalam satu isu. Dan bagi Oxfam adalah penting untuk melihat dampak sebuah permasalahan atau isu terhadap petani dan nelayan, produsen pangan skala kecil.

Itulah yang kami harapkan muncul dari artikel-artikel yang dicalonkan untuk GROW Award.

GROW Award dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran media massa untuk mendukung tujuan program untuk

menguatkan dukungan bagi keberlanjutan sistem produksi pangan lokal dan penghormatan bagi hak-hak produsen pangan skala kecil yang menjadi tulang punggung produksi pangan di Indonesia.

Tahun 2016 ini adalah tahun kedua GROW Award diselenggarakan, dan kami optimis bahwa inisiatif semacam ini penting untuk memotivasi jurnalis untuk lebih giat menyampaikan informasi yang berkualitas tinggi mengenai isu-isu keadilan pangan.

Besar harapan kami buku ini dapat menginspirasi teman-teman jurnalis di seluruh Indonesia untuk berkarya lebih baik lagi.

**Dini Widiastuti**

Direktur Program Keadilan Ekonomi

OXFAM di Indonesia

# KATA PENGANTAR DEWAN JURI KATEGORI CETAK/ONLINE

*Persoalan pangan terpapar di sekitar kita. Dan, tugas jurnalislah mengupasnya satu per satu, menggali solusi dan membangkitkan kesadaran publik.*

**A**da catatan menarik dari penghargaan liputan keadilan pangan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)-OXFAM tahun ini, yakni soal keragaman isu yang diangkat. Biasanya, problem pangan di media hanya berkulat pada masalah distribusi beras dan impor pangan. Liputan juga jarang memfokuskan pada isu pangan lokal. Tentu saja cukup menggembirakan, ketika sejumlah media menurunkan tulisan-tulisan tentang budidaya sorgum, ganyong, garut, sagu, ubi dan beras siger (beras buatan dari singkong) karena sarat aspek kearifan lokal.

Salah satunya, artikel “Supariyem: Pejuang Pangan dari Gunung Kidul”. Tulisan itu jeli memotret kegigihan Bu Supariyem dan warga desa di salah satu kabupaten paling gersang di Pulau Jawa selama 20 tahun terakhir yang memilih bertanam dan mengolah bahan pangan lokal non beras. Saat krisis ekonomi 1997, banyak keluarga di daerah itu nyaris kelaparan karena tak mampu membeli beras. Tanaman padi pun sulit tumbuh di Gunung Kidul. Supariyem berusaha agar

desanya yang tandus berlimpah bahan pokok pengganti nasi, seperti gembili, sorgum dan lain-lain.

Isu keadilan pangan di Indonesia memang sangat kompleks, mencakup hal-hal yang belum selesai seputar hak tanam, pengelolaan lahan, tata niaga yang tak adil, akses makanan sehat yang belum sepenuhnya terjangkau semua kalangan, hingga kesejahteraan petani dan tantangan mereka terhadap perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Di tengah sistem pangan yang belum berpihak pada masyarakat (kecil), liputan media sangatlah penting untuk memetakan persoalan dan memberi arah terhadap kebijakan publik.

Catatan dewan juri, meski isu yang diangkat media sudah cukup beragam, banyak tulisan yang belum menggali persoalan keadilan pangan secara mendalam. Liputan yang dilakukan masih sebatas mendeskripsikan komoditas atau cara petani bercocok tanam. Beberapa artikel juga masih mengandalkan informasi awal dan mewawancarai 1-2 narasumber, tanpa melakukan penelusuran lapangan. Padahal, banyak isu yang menarik ditelusuri.

Keseluruhan tulisan yang masuk ke panitia tahun ini cukup bagus, ada sekitar 103 artikel. Beberapa aspek penilaian mencakup isu yang diangkat, eksplorasi tema, penulisan serta kelengkapan, seperti wawancara, data, narasumber dan liputan lapangan. Dewan juri memilih sepuluh nominasi terbaik, pemenang utama, pemenang berpotensi dan pemenang perempuan. Penghargaan AJI ini juga diharapkan mampu memancing media memberitakan lebih banyak isu keadilan pangan dan memberi porsi liputan yang cukup, seperti halnya topik politik dan hiburan.

**Renjani PS**

Indonesia terus terjebak dalam krisis pangan, yang ditandai dengan terus meningkatnya impor pangan, menyempitnya lahan pangan, menurunnya jumlah penghasil pangan, dan tidak bertambahnya produksi pangan dalam negeri. Krisis pangan ini diperparah dengan kebijakan pangan yang masih setengah hati, sementara kebutuhan pangan justru semakin meningkat dengan penambahan jumlah penduduk yang membutuhkannya.

Informasi tentang kondisi tersebut sangat minim dalam liputan media. Kalaupun ada muncul hanya sesaat terutama ketika terjadi bencana kelaparan ataupun gagal panen. Tidak heran nasib penghasil pangan yakni petani, nelayan, pekebun, peternak dan yang lainnya tidak beranjak sejahtera. Ketika mereka tidak sejahtera, maka sangatlah wajar mereka meninggalkan lahannya dan melarang penerusnya hidup dari lahan mereka. Bahkan meledaknya tren kuliner dan jalan-jalan pun tidak menyentuh nasib penghasil pangan kita.

Sudah semestinya situasi ini menjadi kepedulian rakyat Indonesia. Dan media, sekali lagi, menjadi pelaku yang bisa berperan strategis dalam membangun keberpihakan pada pangan kita. Dan pada akhirnya bisa muncul keberpihakan pada produksi lokal dan penghasil pangannya. Semoga keadilan pangan bisa segera terwujud...

**Tejo Wahyu Jatmiko**

**S**etelah membaca, mencoba menangkap esensi, dan menilai seluruh karya yang masuk, ada beberapa hal yang bisa saya catat, seperti: Dibandingkan tahun lalu sepertinya ada penurunan kualitas naskah yang masuk atau terseleksi. Naskah media cetak masih lebih baik kualitasnya daripada media online, sehingga tidak bisa dibandingkan antara naskah di media online dengan media cetak. Kebanyakan naskah - meskipun baik dari segi jurnalistik - tidak menangkap persoalan ketahanan pangan. Jurnalis masih perlu memahami keadilan pangan agar bisa mendorong sistem produksi pangan yang lebih berkelanjutan dan menyejahterakan petani. Kecenderungannya, mereka melaporkan atau menulis bukan karena didorong oleh adanya ketidakadilan pangan tetapi semata karena ada yang menarik atau sekedar ada berita. Saya harapkan kedepan, jurnalis dan media dapat memberitakan lebih baik lagi. Media memiliki kekuatan mendorong pelaksanaan sistem produksi pangan yang berkeadilan jika para jurnalis betul-betul memahami persoalan keadilan pangan.

**Harry Surjadi**

# KATA PENGANTAR

## DEWAN JURI

### KATEGORI FOTO

Lomba Foto tentang isu keadilan pangan adalah lomba foto yang sulit. Selain tema yang “sempit”, penjabaran tentang hal “adil” dan “pangan” dalam ranah visual adalah sesuatu yang terlalu abstrak bagi fotografer berpengalaman pun.

Itulah yang terbayang di benak para juri lomba foto Grow Award 2016 yang dilaksanakan AJI Indonesia. Walau lomba dengan tema yang sama telah dilakukan dalam beberapa tahun sebelumnya, “ketakutan” juri akan kesulitan penjabaran tema oleh peserta tetap menghantui. Satu yang pasti, foto tidak boleh menyadur ide dari lomba tahun sebelumnya, jadi tema yang sudah sempit menjadi makin sempit karena kesegaran ide menjadi hal utama.

Tetapi ternyata tidaklah demikian. Foto-foto pemenang lomba ini dengan cerdas bisa memotret fakta lapangan dengan jujur, kritis, tetap bermutu secara fotografis, dan yang terpenting bisa memunculkan ide segar. Keadilan pangan ternyata bisa dijabarkan dengan kenyataan semua pihak ikut turun rebug menanam padi misalnya.

Selain itu, lokasi tempat penanaman tanaman pangan yang terekam makin “aneh” juga menunjukkan pentingnya mengutamakan tanaman pangan dibandingkan tanaman lain.

Lomba foto memang tidak sekadar ajang pameran dalam ranah fotografi lagi. Kini fotografi telah menjadi sebuah alat komunikasi yang mudah digunakan segenap lapisan masyarakat karena memang fotografi makin mudah, murah dan umum.

**Arbain Rambey**

Fotografer Harian Kompas

■ su keadilan pangan pada kategori fotojurnalistik di GROW AWARD 2016 belum diterjemahkan secara luas oleh para wartawan foto, sebagian besar liputan masih berkutat di seputar kegiatan di persawahan. Tidak bisa dipungkiri beras masih menjadi primadona bahan pangan di sebagian besar penduduk Indonesia, sehingga aktivitas, proses produksi bahan pangan lain sedikit terlupakan. Yang cukup mengembirakan adalah wartawan foto dari luar Jakarta dan pulau Jawa cukup banyak yang berpartisipasi dan jumlahnya cukup berimbang.

**Rully Kesuma**

**T**ahun ini saya kembali menjadi juri Grow Award untuk yang kedua kalinya. Dari foto-foto yang masuk untuk dijuri, saya belum melihat peningkatan kualitas. Terkait dengan pemahaman atas tema yang dilombakan, yaitu ketahanan pangan dan keadilan sosial; maupun kekayaan cara bercerita secara visual.

Dewan Juri mencari foto-foto yang memperlihatkan kedalaman pesan, dan nilai jurnalisme, tidak hanya foto-foto yang dibuat dengan mempertimbangkan estetika fotografi semata. Gabungan konten, dan visual akan menjadi pertimbangan Dewan Juri dalam menilai foto-foto yang dilombakan.

**Ng Swan Ti**

Fotografer & Program Manager PannaFoto Institute



# KATEGORI CETAK – ONLINE

NOMINASI :

**Tergilas Raksasa Broiler** ..... 19

Oleh Akbar Tri Kurniawan

• **Keamanan Pangan (I): Di Pinggiran City Walk, Perut Kami Terisi** ..... 27

• **Keamanan Pangan (II): Dilema Penataan dan Hadirnya Kaum Urban** . 32

• **Keamanan Pangan (III/Habis): Meniru Jejak Kolonel Sanders** ..... 35

Penulis: Ayu Prawitasari

• **Kemandirian Petani Kopi Lereng Dempo (bagian 1/bersambung)**

• **Bekerja Keras untuk Bertahan Hidup** ..... 39

• **Secangkir Kopi dan Kemandirian Petani Lereng Dempo (bagian 2/habis)**

• **Sebutir Kopi Rezeki Petani** ..... 43

Penulis: Retno Palupi

• **Samin versus Semen (bagian 1)** ..... 49

• **Samin versus Semen (bagian 2)** ..... 55

Penulis: Dandhy Laksono

**Membangun Pangan Upaya Merenda Asa Tetap Bergelora** ..... 61

Penulis: Cornelius Helmy

**Petani Organik Tetap Sejahtera di Era Perubahan Iklim** ..... 67

Penulis: Cornelius Helmy

**Suparjiyem: Pejuang Pangan dari Gunung Kidul** ..... 73

Penulis: Haris Firdaus

**Ketika Garam Asing Diizinkan Masuk** ..... 81

Penulis: A Fikri Ashri

**Sapi Minoritas di Ibu Kota** ..... 87

Penulis: Akbar Tri Kurniawan

**Meregang Nyawa di Bawah Pohon Nira:**

**Menggugat Ketidakadilan Juragan Gula Kelapa** ..... 93

Penulis: Agus Setiyanto

PEMENANG TERBAIK:

**Tergilas Raksasa Broiler**

Penulis: Akbar Tri Kurniawan - Majalah Tempo

PEMENANG BERPOTENSI DARI MEDIA LOKAL:

**Meregang Nyawa di Bawah Pohon Nira**

**(Menggugat Ketidakadilan Juragan Gula Kelapa)**

Penulis: Agus Setiyanto - SatelitPost/ satelitnews.co

PEMENANG BERPOTENSI – JURNALIS PEREMPUAN:

• **Kemandirian Petani Kopi Lereng Dempo (bagian 1/ bersambung):**

**Bekerja Keras untuk Bertahan Hidup**

• **Secangkir Kopi dan Kemandirian Petani Lereng Dempo (bagian 2/habis):**

**Sebutir Kopi Rezeki Petani**

Penulis: Retno Palupi - Sindo Palembang



**Akbar Tri Kurniawan**

Saat ini berdomisili di Pamulang, Tangerang Selatan, dan telah bekerja di TEMPO sejak 8 tahun yang lalu. Ia bisa dihubungi melalui email [akbar:tempo@gmail.com](mailto:akbar:tempo@gmail.com).

# TERGILAS RAKSASA BROILER

Dimuat dalam Majalah Tempo, tanggal 8-14 Juni 2016  
Oleh **AKBAR TRI KURNIAWAN**

*Puluhan ribu peternak kecil gulung tikar akibat anjloknya harga ayam broiler. Perusahaan besar yang menguasai 70 persen pasar ditengarai bakal memonopoli.*

**K**andang ayam milik Jenny Soelistiani di Kabupaten Metro, Lampung, itu kosong melompong. Dalam kondisi normal, delapan deret kandang beralas bambu beratap rumbia itu masing-masing berisi 2-3 ribu ekor ayam pedaging atau broiler. Bisnis peternakan Sumber Sari Farm milik Jenny berhenti beroperasi setelah bertubi-tubi merugi.

Penyebabnya, harga ayam hidup dibanderol Rp 14 ribu per kilogram, padahal harga pokok penjualannya Rp 17 ribu. Tingginya ongkos produksi berasal dari harga pakan ternak yang melangit. Peternak berusia 49 tahun itu tidak mampu bertahan menanggung kerugian yang berlangsung sepanjang 2014. Akhirnya usaha yang dirintisnya sejak 1993 itu kandas pada Desember tahun lalu. "Kami terkejut dan merugi," katanya, Kamis dua pekan lalu.

Anjloknya harga ayam hidup akibat membanjirnya daging broiler di pasar tradisional yang berasal dari peternakan milik PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. Tahun lalu peternakan Charoen di Lampung memproduksi lima juta ekor broiler.

Ayam broiler mereka ini masuk ke pasar tradisional bercampur dengan broiler peternak mandiri seperti Jenny. Karena volume pasokan melebihi permintaan, harga ayam hidup terjun bebas, meski harga dagingnya relatif stabil.

Kondisi di Lampung mewakili gambaran serupa secara nasional. Direktur Pembibitan Kementerian Pertanian Abu Bakar mengatakan produksi broiler mencapai 49 juta ekor per minggu, melebihi kebutuhan nasional yang 42 juta ekor per pekan pada 2014. "Tahun ini kelebihan suplai bakal terulang," ujarnya.

Joko Susilo, peternak asal Sentul, Bogor, Jawa Barat, yang juga anggota Tim Advokasi Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional, mengatakan mereka mengantongi laba hanya dua bulan sepanjang 2014. "Kerugian berlanjut tahun ini."

Gonjang-ganjing harga ayam hidup terendus Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil. Peternak bermodal cekak terancam musnah karena daya tahan modalnya tidak sekuat perusahaan besar, meski sama-sama menanggung kerugian dalam budi daya. "Peternak kecil untung dua kali, ruginya tiga kali. Ini tidak sehat," katanya, Kamis pekan lalu.

Yang dimaksud perusahaan besar adalah PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Direktur Pembibitan Abu Bakar mengatakan Charoen menguasai pangsa pasar 44 persen. Tapi asosiasi peternak menyebut Charoen mendominasi sampai 49 persen. Adapun Japfa sekitar 22 persen.

Charoen dan Japfa sebenarnya juga ikut tekor lantaran harga ayam hidup yang jatuh. Namun, menurut Abu Bakar, keduanya masih mampu menutupi kerugian dari penjualan *day old chick* (DOC) atau bibit broiler dan pakan ternak. "Kalau peternak kecil sudah kolaps."

Direktur Pemasaran Charoen Pokphand, Jemmy Wijaya, menampik anjloknya harga ayam hidup akibat produksi perseroannya yang membanjir. Menurut dia, volume produksi DOC Charoen masih wajar dan tidak mengganggu pasar, karena pangsa Charoen mencapai 39 persen. Ia menilai klaim oversuplai dan rendahnya permintaan merupakan jurus distributor broiler untuk mendapatkan harga murah dari peternak. "Itu cara mereka tawar-menawar," katanya.

Budiarto Soebijanto, Wakil Direktur Utama PT Multibreeder Adirama Indonesia Tbk, perusahaan pembibitan milik PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, menyatakan ekspansi perusahaannya masih terhitung normal. "Peningkatan volume DOC broiler kami masih 1,5 kali lipat," ucapnya.

**K**ementerian Pertanian tahu betul badai kerugian yang menimpa peternak kecil akibat melimpahnya DOC milik perusahaan pembibitan. Tapi Direktur Pembibitan Abu Bakar mengakui pemerintah enggan memaksa produsen memangkas produksi. "Nanti saya dituding mengintervensi pasar," katanya.

Jalan keluarnya, Abu Bakar memfasilitasi terbentuknya tim *ad hoc* yang beranggotakan perusahaan pembibitan dan asosiasi peternak pada Desember 2014. Chandra Gunawan, General Manager Charoen Pokphand, ditunjuk sebagai ketua.

Tim *ad hoc* menghitung produksi broiler 2015 mencapai 64 juta ekor per minggu atau 3,3 miliar ekor per tahun. Volume ini melebihi kebutuhan broiler yang mencapai 47 juta ekor per pekan. Dengan sendirinya harga jatuh.

Solusinya, DOC broiler harus dipangkas dengan cara mengaborsi. Pemangkas diharapkan menyundul harga DOC, yang imbasnya menaikkan harga ayam hidup. Rupanya

perhitungan itu meleset. Harga DOC memang naik, tapi harga ayam hidup tetap rendah.

Para peternak mencurigai Charoen dan Japfa tak serius mengurangi produksi, lalu muncul pernyataan mosi tak percaya kepada Chandra Gunawan sebagai ketua tim. "Memangkas DOC bukan perkara mudah. Harus ada kesepakatan bersama," kata Chandra.

Sigit Prabowo, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Unggas Nasional sekaligus anggota tim *ad hoc*, mengatakan, karena aborsi DOC gagal, jumlah induk broiler atau *parent stock* (PS) harus dikurangi. Tim menggelar rapat di kantor Abu Bakar di Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat, 8 Mei lalu. Mereka sepakat 8 juta ekor PS yang harus dimusnahkan. Masalahnya, PS milik siapa yang akan dihabisi?

Chandra menyodorkan kesediaan Charoen memangkas 4 juta ekor PS. Tapi usul itu dianggap terlalu kecil oleh perwakilan Japfa, Agus Tono. Hitungan Japfa, Charoen harus memotong 6 juta ekor PS. Wakil Direktur Utama MBAL, Budiarto Soebijanto, bos Agus Tono, mengatakan usul Japfa mengacu pada besaran ekspansi impor kakek-nenek broiler atau *grandparent stock* (GPS) setiap perseroan. "Charoen harus memangkas lebih besar karena lonjakan volume GPS-nya 10 kali lipat," kata Budiarjo.

Jemmy Wijaya menolak usul Japfa. Ia menilai 4 juta ekor PS sudah mencapai 50 persen. "Padahal volume GPS kami kurang dari 50 persen," katanya.

Karena situasi tegang, Abu Bakar menghentikan rapat yang sudah berlangsung tiga jam itu. Rapat dilanjutkan pada Senin, 11 Mei, di tempat yang sama. Abu Bakar meminta perwakilan Japfa yang datang setara dengan direktur. Tiga hari kemudian rapat digelar. Namun perwakilan Japfa yang hadir lagi-lagi

Agus Tono. Abu Bakar kecewa, lalu mengusir Agus. “Saya suruh keluar karena dia tidak diundang,” katanya.

Budiarto menilai pengusiran Agus Tono bukan karena tak diundang, tetapi data yang disajikan Japfa lebih valid dan menohok Charoen. “Kalau tak terima, seharusnya koreksi data kami,” ucap Budiarto. Rapat bubar tanpa menghasilkan kesepakatan apa pun hingga sekarang. “Tim *ad hoc* vakum,” Abu Bakar menambahkan.

Imbasnya, overproduksi masih berlangsung dan mengancam peternak kecil. Joko Susilo dari Tim Advokasi Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional menilai pemerintah lamban melindungi peternak kecil dari gelagat monopoli atau oligopoli perusahaan raksasa. “Kalau hal ini dibiarkan, tahun depan peternak kecil punah.”

*Akbar Tri Kurniawan, Nurrochman Arrazie (Lampung)*

## BANJIR PRODUKSI MEMICU MONOPOLI

### KONSUMSI, KEBUTUHAN, DAN PRODUKSI DAGING AYAM NASIONAL

TAHUN	KONSUMSI (KG/KAPITA/TAHUN)	KEBUTUHAN (JUTA EKOR/ MINGGU)	PRODUKSI (JUTA EKOR/ MINGGU)
2010	5,8	28	28
2011	6,3	32	31
2012	6,9	33	34
2013	7,6	38	43
2014	8,4	42	49
2015 (potensi)	12	47	64

## NILAI EKONOMI BROILER

- Kebutuhan DOC broiler: 2.444 juta ekor/ tahun
- Nilai pasar broiler hidup: Rp 29-35 triliun/tahun
- Nilai pasar daging ayam: Rp 109-117 triliun/tahun

CATATAN: 1 EKOR BROILER = 1,6 KILOGRAM DAGING AYAM

## DUA VERSI USULAN ABORSI

NO	PERUSAHAAN	ESTIMASI JUMLAH PARENT STOCK (EKOR)	USULAN PARENTS STOCK YANG DIABORSI (EKOR)	
			VERSI CHAROEN POKPHAND	VERSI JAPFA COMFEED
1	Charoen Pokphand Indonesia	17.734.356	4.044.524	6.779.525
2	Japfa Comfeed Indonesia	6.408.108	1.461.443	885.173
3	Bibit Indonesia	2.620.800	597.704	148.059
4	CheilJedang-Patriot Intan Abadi	1.782.000	406.406	68.452
5	Wonokoyo	1.149.120	262.070	28.464
6	Taat Indah Bersinar	1.008.720	230.050	21.934
7	Hybro Indonesia	936.000	213.466	18.885
8	Missouri	843.840	192.447	15.349
9	Cibadak Indah Sari Farm	840.924	191.782	15.243
10	Expravet Nasuba	625.680	142.694	8.439
11	Reza Perkasa	516.708	117.841	5.755
12	Satwa Borneo Jaya	432.000	98.523	4.023
13	Karya Indah Pertiwi	180.000	41.051	698
Total		35.078.256	8.000.000	8.000.000

SUMBER: KEMENTERIAN PERTANIAN, CHAROEN POKPHAND, JAPFA COMFEED





**Ayu Prawitasari**

Jurnalis kelahiran Jember ini kini bekerja untuk Solo Pos sebagai Redaktur Muda. Ia bisa dihubungi melalui email [ayu.prawitasari@yahoo.com](mailto:ayu.prawitasari@yahoo.com)

# KEAMANAN PANGAN (I) DI PINGGIRAN CITY WALK, PERUT KAMI TERISI

Dimuat dalam Harian Umum Solopos, tanggal 1,2, dan 3 Februari 2016  
Oleh: **AYU PRAWITASARI**

**P**edagang kaki lima (PKL) menjadi tumpuan masyarakat urban, khususnya menengah dan menengah ke bawah yang sebagian waktu mereka dihabiskan di luar rumah. Harga makanan yang terjangkau dan lokasi strategis menjadi penyebab. Dari sisi keamanan pangan, warga berisiko tinggi mengonsumsi makanan tidak sehat dan berbahaya karena PKL tak mengantongi izin layak sehat.

Waktu makan siang sudah berlalu, Sabtu (23/1). Namun, belasan pedagang kaki lima (PKL) yang membuka *dhasaran* (lapak) di pinggiran *city walk* Jl. Slamet Riyadi, dekat Solo Grand Mall (SGM), masih saja sibuk melayani pengunjung yang terus berdatangan.

Asap tipis mengepul di pinggiran jalan, bercampur dengan debu jalanan dan knalpot kendaraan. Kompor gas aktif bekerja dengan beragam peralatan memasak di atasnya: panci untuk merebus kuah soto dan mi ayam, ketel untuk merebus air, wajan untuk memasak mi rebus, dan masih banyak lagi. Suara *ulekan* yang bercampur baur dengan nyaringnya uap ketel berhasil menghidupkan pusat kuliner yang terletak di pusat kota tersebut.

Sepanjang kurang lebih 200 meter (dari SGM sampai Toko Buku Toga Mas), belasan PKL menata dagangan mereka mereka berjajar. Gerobak kuning pemberian Pemkot di era pemerintahan Joko Widodo (Presiden), ditata lurus berikut meja dan kursi pengunjung. Dengan lebar *city walk* yang hanya lima meter, 1,5 meter digunakan para PKL untuk menggelar tempat *dhasaran*. Agar tak makin mengganggu para pejalan kaki, mereka juga memanfaatkan saluran air yang ditutup tripleks dan kayu seadanya untuk tempat mencuci peralatan makan dan memasak, hingga tempat sampah.

Di taman kota yang lokasinya sejajar dengan *city walk*, seorang laki-laki dengan dua anak kecil asyik menikmati teh dan susu cokelat hangat di gelas kaca. Beberapa bungkus *snack* memenuhi meja taman. Wajah lelaki itu kebingungan saat seorang anaknya merengek ingin buang air kecil. Setelah mengedarkan pandangannya ke sekeliling taman, laki-laki itu meminta anaknya pipis di taman. “Bingung toiletnya di mana. Kalau pipis di selokan terlalu dekat dengan tempat mencuci para PKL,” ujar laki-laki yang tak bersedia menyebut namanya tersebut.

Sementara itu, di sudut yang lain, seorang PKL penjual satai, Udin, tergopoh-gopoh mendatangi seorang pengunjung yang memarkir kendaraannya di *city walk*. “Mohon maaf Mbak. Jangan diparkir di *city walk*. Enggak boleh sama pemerintah. Nanti kami yang kena. Kalau nekat bisa digembok Dishub [Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika],” kata dia.

“Ah hanya sebentar kok. Masa tidak boleh,” bantah si pengunjung. Udin pun hanya bisa diam meski perhatiannya tak bisa lepas dari sepeda motor pengunjung yang nekat tersebut.

“Saya sebenarnya khawatir,” kata Udin. Pemkot meminta

PKL di *city walk* pindah sejak awal Januari lalu. “Nyatanya Pemkot belum bisa memberi solusi tempat pindah yang sesuai. Jadi meski kami belum dipaksa pindah, tapi di sekitar *city walk* sering ada penertiban. Kendaraan yang diparkir di sini langsung digembok. Pembeli yang agak jauh akhirnya malas datang,” kata dia.

## **DAPUR JADI KENANGAN**

Menurut Udin, PKL di *city walk* Jl. Slamet Riyadi menjadi tumpuan warga dengan penghasilan terbatas. Kebanyakan pembeli adalah pegawai toko dan karyawan swasta dengan gaji setara upah minimum kota, Rp 1,2 juta/bulan. “Harga yang kami tawarkan bersaing. Makan satai ayam plus nasi dan es teh di tempat saya hanya Rp 15.000. Ada juga soto yang semangkok hanya Rp 4.000. Macam-macam. Dibandingkan dengan harga makanan di *food court* [SGM] atau restoran jauh sekali,” jelas dia.

Apa yang disampaikan Udin dibenarkan seorang petugas linmas, Guntur Budaya. “Warung makan dan angkringan di pinggir jalan itu tujuan kami. Mana bisa kami jajan ke tempat makan yang bagus, enggak ada uangnya,” kata dia.

Pengamat ketahanan pangan dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof. Darsono, mengatakan ketahanan pangan tak hanya mencakup ketercukupan dan ketersediaan pangan, namun juga akses akan pangan. Keadilan pangan menjadi masalah serius daerah urban. “Kalau bicara soal akses pangan, keamanan pangan adalah hal yang harus diperhatikan di perkotaan ketimbang ketersediaan pangan. Keterbatasan lapangan kerja formal menyebabkan PKL, khususnya PKL kuliner makin marak. Dengan latar belakang pendidikan tata boga yang terbatas, mereka bertahan hidup dengan

cara berjualan makanan. Kebersihan makanan jelas mereka abaikan, apalagi soal ketercukupan gizi," jelas dia.

Keberadaan para PKL *by tragedy* (impitan ekonomi), bukan *by design* (cukup modal), menurut Darsono, sangat dibutuhkan warga yang juga bekerja di sektor informal yang jumlahnya dari tahun ke tahun meningkat serta pekerja formal dengan gaji kecil. "Tuntutan ekonomi yang makin tinggi menyebabkan lebih banyak warga, laki-laki dan perempuan, keluar rumah untuk mencari uang. Dapur dan ruang makan yang menawarkan makanan yang bersih dan sehat mulai ditinggalkan. Kondisi ini seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Membantu warga miskin dan rentan miskin bukan hanya lewat bantuan beras [raskin atau raskin daerah], tapi juga pengawasan makanan dan pemberian edukasi kepada PKL soal makanan sehat," kata dia.

Buruknya tempat *dhasaran* makanan hingga kualitas makanan di pinggir jalan dibenarkan Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Efi S. Pertiwi. Efi mengatakan penyedia makanan seharusnya memegang lisensi kesehatan yang dikeluarkan Pemkot. Saat ini, semua PKL di Solo tidak memegang lisensi itu sehingga mereka tidak bisa menjamin keamanan makanan yang mereka tawarkan.

Mengacu kepada regulasi pemerintah, pemerintah pusat maupun daerah hanya mengakui restoran, warung makan, dan jasa katering sebagai penyedia makanan. Tidak ada PKL kuliner dalam regulasi pemerintah yang mengatur tentang kesehatan makanan, baik itu di Permenkes 1098/MENKES/SK/VIII/2003 Tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran serta Permenkes 1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga, sebagai berikut :

## **PENYEDIA JASA MAKANAN YANG PUNYA IZIN LAYAK SEHAT**

1. Rumah makan: tempat usaha komersial yang menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya
2. Restoran: tempat usaha komersial yang menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya. Sebagian atau seluruh bangunannya permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
3. Jasa boga (jasa katering): usaha pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha.

## **PROBLEM PANGAN PERKOTAAN:**

1. Jumlah penduduk makin padat (2014: tingkat kepadatan penduduk 11.582 jiwa/km<sup>2</sup>, 2004: 975 jiwa/km<sup>2</sup>)
2. Sektor informal tinggi  
Jumlah pekerja 2014: 258. 236 orang
  - Pekerja formal: 71,14%
  - Pekerja informal: 28,86% (PKL, buruh, pegawai toko, dan lainnya).
3. PKL kuliner makin marak: latar belakang pendidikan rendah, tempat berjualan tidak standar, akses kredit ke perbankan rendah, modal cekak.
4. Akses pangan tidak merata: warga menengah mengonsumsi makanan yang secara tidak mendapat jaminan keamanan kesehatan dari pemerintah.

SUMBER: STATISTIK DAERAH KORA SURAKARTA 2015, DKK, DPP.

## KEAMANAN PANGAN (II)

# DILEMA PENATAAN DAN HADIRNYA KAUM URBAN

**T**umpukan dokumen memenuhi meja Kepala Bidang (Kabid) Pedagang Kaki Lima (PKL) Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Solo, Hery Mul, Rabu (27/1) lalu. Beberapa dokumen ia buka sembari membaca singkat.

Salah satu map berisi belasan surat permohonan bantuan gerobak yang diajukan para PKL. “Yang seperti ini [mengajukan permohonan bantuan gerobak] banyak. Tiap tahun ada. Sampai sekarang kurang lebih 200 PKL yang mengajukan permohonan bantuan,” kata dia.

Pemberian gerobak merupakan salah satu solusi yang ditawarkan Pemkot untuk menata PKL. Solusi lain yang diterapkan sejak 2005 lalu adalah memasukkan PKL ke pasar tradisional, membuatkan *shelter*, dan lainnya.

Berdasarkan data DPP, ada 5.817 PKL di Kota Solo (sejak 2005) yang harus ditata dengan target *zero* PKL di jalanan nantinya. “Jumlah PKL yang menggunakan hak pejalan kaki dan jalan umum berkurang banyak saat Pak Jokowi memindahkan mereka ke Pasar Klithikan Notoharjo. Menurut data, saat ini tinggal 178 PKL yang belum ditata,” jelas dia. Namun, Hery buru-buru menambahkan data tersebut tidak akurat. Ia meyakini jumlah PKL di Kota Solo yang menggunakan aset Pemkot masih banyak. DPP belum

mendata lagi untuk mengetahui jumlah pasti PKL yang tersebar di jalan.

“Menurut data ya seharusnya tinggal 178 PKL di Solo, sementara tahun ini bisa *zero*. Namun, ya mana mungkin. Setiap kami pantau di lapangan selalu ada PKL baru. Jumlah riilnya ya pasti lebih dari 178 orang,” ujar dia.

Pesatnya pembangunan di Solo menjadi daya tarik warga luar kota berdatangan ke Kota Bengawan. Menurut Hery, jumlah warga yang berada di Solo saat pagi hingga siang hari mencapai dua kali lipat jumlah penduduk yang saat ini sekitar 500.000 jiwa. Lapangan kerja yang terbatas membuat pekerja di sektor informal makin tahun makin banyak. Kondisi ini menyebabkan jumlah PKL terus bertambah, terutama PKL kuliner.

“PKL menjadi persoalan semua kota, terutama kota besar. Solo salah satunya. Di satu sisi, kami ingin aset Pemkot sesuai peruntukan, misalnya trotoar untuk pejalan kaki. Nah, di sisi lain PKL yang tersisih dari dunia kerja mencoba mencari peruntungan di jalanan,” kata dia.

Maraknya PKL kuliner di jalanan, menurut Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kota (DKK), Efi S. Pertiwi, merepotkan. Selama ini, DKK kesulitan mengedukasi PKL agar menyediakan makanan yang sesuai standar kesehatan.

Efi mengakui upaya Pemkot mengundang PKL supaya menghadiri penyuluhan kesehatan tidak optimal. “Banyak yang tidak datang saat kami undang. Alasannya buang waktu dan buang uang, kecuali dalam pertemuan ada bantuan usaha atau kami kaitkan dengan perizinan. Intinya kalau ada iming-imingnya baru mau datang,” kata dia.

Baik Efi maupun Hery berpendapat yang bisa memberikan

sanksi kepada PKL yang menjual makanan tidak sehat adalah konsumen. Efi menyarankan warga tidak membeli makanan di PKL yang tempat *dhasarannya* kumuh serta penjualnya tidak bersih. Di sisi lain, Hery mengusulkan ada peraturan daerah seperti di Bandung yang mendenda warga yang membeli makanan di PKL.

Sementara itu, menurut pengamat ketahanan pangan dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Prof. Darsono, problem PKL tidak hanya bisa diselesaikan lewat penertiban oleh Satpol PP atau mendenda konsumen. Masalah PKL sejatinya sangat kompleks karena menggambarkan arus urbanisasi, minimnya lapangan kerja, hingga ketimpangan pendapatan. “Urusan *street food* ini menggambarkan daya beli masyarakat yang rendah yang jumlahnya [warga] banyak. Imbasnya adalah mereka [masyarakat berpenghasilan rendah] *insecure* dari sisi keamanan pangan termasuk PKL-nya. Kewajiban pemerintah maupun elemen masyarakat seharusnya mengeluarkan si produsen [PKL] dan konsumen keluar dari jebakan ekonomi ini. Caranya ya beri mereka pengetahuan, tingkatkan kesejahteraan, tingkatkan pengawasan, dan masih banyak lagi lainnya,” kata dia.

KEAMANAN PANGAN (III/HABIS)

## MENIRU JEJAK KOLONEL SANDERS

Ikun makanan cepat saji Kentucky Fried Chicken (KFC) menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan para pekerja dan keluarga di berbagai belahan dunia. Wajah seorang pria tua berpipi gembil, berjenggot putih, dengan kaca mata besar telah mewarnai perjalanan bisnis *fast food* yang menggambarkan perubahan pola makan kaum urban. Dialah Harland David Sanders atau lebih dikenal dengan Kolonel Sanders, pendiri perusahaan restoran cepat saji KFC yang kini berdiri di lebih dari 80 negara.

“Nah, tidak ada salahnya kita belajar pada Kolonel Sanders. Belajar tentang arti kesempatan, tentang situasi, tentang substitusi dapur, dan juga kualitas makanan,” kata pengamat ketahanan pangan dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Prof. Darsono, pekan lalu.

Sebagai seorang pebisnis sukses, Sanders memulainya dari nol. Dikutip dari berbagai sumber, Sanders adalah seorang yatim sejak usia enam tahun. Berasal dari keluarga miskin, Sanders melakoni berbagai pekerjaan semasa hidupnya, mulai dari tukang kebun, kondektur bus, *sales*, juru parkir, penjaga pom bensin, dan masih banyak lagi. Sanders mencoba menjual ayam goreng dan steak saat bekerja di sebuah pom bensin dan bengkel mobil di Kentucky, 1930 silam. Keputusan itu ia ambil ketika melihat banyak pengendara mobil yang mencari

makanan saat mengisi bensin atau membetulkan kendaraan mereka.

“Industrialisasi di Amerika menyebabkan perubahan pola makan para pekerja, laki-laki dan perempuan. Desain makanan [KFC] disesuaikan dengan kebutuhan warga yaitu *fast food* [makanan cepat saji]. KFC menjadi substitusi dapur rumah tangga,” jelas Darsono.

Kondisi yang hampir serupa terjadi di Solo. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Solo 2014, di negara berkembang dan negara maju, termasuk Solo, terjadi pergeseran distribusi penduduk bekerja dari sektor pertanian ke sektor industri maupun jasa. Saat ini, sektor perdagangan, hotel, dan restoran menempati urutan tertinggi penyumbang produk domestik regional bruto (PDRB) yakni sebesar 26,81%, kedua adalah industri dan pengolahan sebesar 19,19%, dan terakhir sektor pertanian sebesar 0,05%. Dengan meningkatkan kelas PKL melalui standarisasi keamanan pangan, menurut Darsono, Pemkot secara tidak langsung telah menjaga keamanan *fast food* ala Indonesia.

Di negara maju, sambung Darsono, *street food* juga tidak bisa hilang. Namun, dari sisi kebersihan makanan, tempat *dhasaran*, penjual, maupun kualitas makanan jauh lebih baik dibanding Indonesia. Dia mencontohkan PKL di Malaysia yang kebanyakan merupakan warga Indonesia.

“PKL-nya dari Indonesia. Namun, lihat tempat berjualan mereka, bagus sekali. Pemerintah memfasilitasi PKL dengan tempat mengolah makanan yang bersih, mesin pencuci dan pengering piring, tempat untuk cuci tangan bagi konsumen, serta masih banyak lagi,” kata dia.

Langkah kedua, sambung Darsono, Pemkot bisa membuat peraturan daerah khusus tentang pedagang kaki lima termasuk

zona-zona yang diperbolehkan dan dilarang. Zona merah menjadi daerah terlarang untuk PKL kuliner, zona kuning hanya untuk *event* tertentu semisal *car free day*, dan zona hijau adalah kawasan yang diperbolehkan untuk PKL.

Sementara itu, Kepala Kantor Ketahanan Kota Solo, Kentis Ratnawati, mengakui belum bisa mengawasi kualitas makanan yang ditawarkan para PKL di jalanan. Namun, mulai tahun ini Kantor Ketahanan Pangan berencana memberikan pelatihan tentang cara mengolah makanan sehat untuk ibu-ibu PKK. Syaratnya, peserta pelatihan harus memiliki usaha mengolah makanan dan masih menerima pesanan. Pelatihan yang nantinya digelar bekerja sama dengan SMKN 7 diharapkan Kentis mampu mencetak pemasok makanan matang di warung makan, angkringan, katering, dan lainnya yang sesuai standar kesehatan.

Rencana tersebut disambut baik seorang penjual ayam bakar di daerah Semanggi, Pasar Kliwon, Solo, Tumini, 50. Di beranda rumah berukuran 3 meter x 3 meter, di depan tumpukan sepeda dan ember bekas, wanita itu sibuk mengolah ayam bakar yang akan ia titipkan ke sejumlah angkringan maupun ia jajakan sendiri.

Hari itu, Tumini merasa tubuhnya tak begitu sehat. Selain tekanan darah yang tiba-tiba meninggi, gejala flu mulai ia rasakan. Beberapa kali ia memencet-mencet hidung yang ia rasakan tak nyaman. Keringat dingin yang membasahi wajahnya ia usap berkali-kali dengan tangan kanan sembari sibuk membolak-balik ayam bakar di sebuah tungku panjang. Sesekali ia renggangkan ayam bakar dan ati ayam yang ditata berjajar di tusuk bambu dengan tangan itu. "Saya tak pernah dapat pelatihan memasak. Bantuan modal juga tidak pernah. Kalau tidak punya uang ya enggak jualan dulu. Ya kalau dapat bantuan dari pemerintah pasti senang sekali."



**Retno Palupi**

Reporter Harian Seputar Indonesia selama delapan tahun sejak Tahun 2007-2016 (sekarang). Selama bertugas pernah ditugaskan peliputan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Sementara untuk bidang peliputan, pernah ditugaskan di bidang Hukum, Pertahanan Keamanan, Politik, Pendidikan, Floating, pemerintahan, Bisnis, Kesra, dan sebagainya. Jurnalis yang berdomisili di Palembang ini bisa dihubungi melalui email [luisindo\\_sumsel@yahoo.com](mailto:luisindo_sumsel@yahoo.com).

KEMANDIRIAN PETANI KOPI LERENG DEMPO  
(BAGIAN I/BERSAMBUNG)

## BEKERJA KERAS UNTUK BERTAHAN HIDUP

Dimuat dalam Koran Sindo Palembang, tanggal 18 Maret 2016

Oleh: **RETNO PALUPI**

**G**uratan indah langit biru diliputi sapuan awan bak kapas putih melapisi pucuk indah Gunung Dempo pagi itu. Para petani yang bergegas sejak pagi hari, mulai menapaki kebun-kebun kopi yang tumbuh subur. Sebagian menjajaki sawah hijau membentang dan pekerja lainnya, beranjak ke kaki-kaki pegunungan memetik pucuk hijau muda dedaunan teh.

Gunung Dempo terletak di Kota Pagaralam, wilayah ujung barat Provinsi Sumatra Selatan. Untuk tiba disana, memakan waktu delapan-sembilan jam perjalanan darat dari Kota Palembang. Lereng Dempo memang dikenal dengan perkebunan teh, namun tidak kalah hamparan luas kota itu juga diliputi kebun-kebun kopi milik masyarakatnya. Seperti di kelurahan Curup Gare, kebun kopi nampak bersusun dengan indah. Pertengahan Maret ini, memang belum begitu banyak petani yang menilik kebun kopi, yang sudah diwarisi turun-temurun sejak zaman Kompeni. Maklum, panen masih sekitar dua bulan lagi. Nampak, biji-bijian kopi robusta yang merupakan jenis turunan dari spesies *coffea canephora* ini

sebagian masih hijau di dahan dan tidak sedikit pula yang sudah ranum ingin dipetik.

Masyarakat pegunungan Dempo yang tinggal di pelosok-pelosok desa hingga kawasan kota pun mempertahankan kultur bercocok tanam terutama kopi, sayur-mayur, dan sedikit kaplingan padi. Di samping itu, tanaman teh juga tumbuh subur di lereng gunung, menjadi basis produksi perkebunan besar PTPN VII. Lagi-lagi kopi. Ini lah komoditas utama dan unggulan khas kawasan tanah di dataran tinggi dengan tanah agak basah, dan kaya unsur organik. Bisa dibilang, kopi akan melimpah ruah acap kali musim panen tiba, seperti halnya tahun lalu dan juga diprediksi tahun 2016 ini. Meski harga tak setinggi di daerah lain seperti Lampung dan Aceh, namun kisaran harga Rp 16.000-Rp 19.000/kg menjadi harapan petani kopi yang menggantungkan hidupnya untuk jenis tanaman yang dipanen sekali dalam setahun tersebut.

Hampir 75% penduduk Pagaralam menggantungkan hidup dengan menanam kopi demi memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Dengan hasil panen yang baik dan harga *mumpuni*, petani dapat “menukar” dengan beras dan lauk-pauk atas hasil penjualan kopi tersebut kepada para agen atau supplier. “Kalau harga kopi baik kami bisa beli beras atau menukar dengan kebutuhan hidup lain. Kalau kondisi tidak berpihak, kami menyelangi dengan menanam sayur dan sedikit padi agar bisa bertahan memenuhi kebutuhan hidup keluarga,” ujar Iswadi,<sup>39</sup> yang merupakan warga Desa Pagar Banyu, Kelurahan Curup Jare, Kecamatan Pagaralam Utara, Kota Pagaralam, Selasa (15/3).

Iswadi dan istri yang tengah membersihkan dangau (gubuk) di tengah-tengah kebun kopinya mengaku hendak melihat perkembangan buah kopi yang berbuah lebat pada tangkainya yang lentur membentuk tajuk seperti payung pada

batang-batang pohonnya. Batang-batang kopi yang tersusun di bagian depan memang nampak tidak begitu tinggi namun buahnya amat lebat seolah tangkai tak mampu menahan beratnya. Saat menapaki bagian tengah kebun seluas sekitar setengah hektare itu, bau tanah basah cukup kental. Dedaunan lebat pohon kopi menyibak wajah kami yang tengah melintasi. Suhu yang sejuk dan agak kering khas Pagaralam ini cukup menyenangkan. Wajar, batang kopi tua yang bahkan di antaranya berumur 40-45 tahun ini seolah tak ingin punah dari daerah agraris ini. Merah kekuningan, buah- buah kopi seolah siap disortir.

Iswadi dan Sri Rezeki sang istri, nampak sumringah melihat kebunnya pagi itu. “Kalau panen Mei nanti tiba, saya sudah membayangkan membeli aneka bahan pangan, sejumlah perabot rumah, dan biaya anak sekolah,”ucapnya. Musim panen nanti, keluarganya dapat tiga kali memetik hasil panen kopi dari sekitar 1.000 batang kopi yang berjajar rapi di kebunnya. Total panen dapat mencapai 1 ton tak jauh beda dengan tahun sebelumnya. Mutirgh atau memetik hasil panen, merupakan waktu yang paling ditunggu selama setahun bagi para petani kopi di lereng Dempo ini.

“Kami tak bisa atur soal harga,dan kami jual ke agen dan eksportir yang ada. Mereka menentukan harga berdasar kualitas dan harga pasaran,”ucapnya. Itulah sebab, warga Pagaralam mempertahankan perkebunan kopi yang diwarisi sejak puluhan tahun secara turun temurun sebagai tiang ekonomi. “Kopi ini untuk tungguan, tidak mungkin kami hanya mengandalkan kopi yang bisa dipanen sekali setahun. Kami tak punya pekerjaan apa-apa hanya bertani. Maka itu, kami mencoba menanam sayuran dan sedikit padi dari secuil tanah yang kami miliki agar dapat terus bertahan dari waktu ke waktu sembari menunggu panen kopi,”ungkapnya.

Dia berharap, biji kopi yang dipanen tidak keropos karena hama. Sehingga karung- karung siap dipenuhi biji kopi yang siap dijual untuk bahan minuman yang digandrungi masyarakat dunia ini. Kendati demikian, produksi kopi yang melimpah ruah ini belum didukung secara optimal dalam hal peningkatan kualitas atau daya saing produk, harga ideal, dan juga konteks hilirisasi. Padahal, Pagaralam dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi Robusta unggulan Indonesia.

SECANGKIR KOPI DAN KEMANDIRIAN  
PETANI LERENG DEMPO (BAGIAN 2/HABIS)

## SEBUTIR KOPI REZEKI PETANI

Dimuat dalam Koran Sindo Palembang, 19 Maret 2016

Oleh: **RETNO PALUPI**

**K**opi giling sisa hasil panen tahun lalu sudah hampir habis. Namun Iswadi dan Sri tidak pernah berhenti berharap. Panen kopi tahun ini dirasanya bakal melimpah ruah. Meski produksi tak sebanyak tuan tanah, hasil kopi di kebunnya masih menghasilkan rezeki. Meskipun memang, keuntungan yang diperoleh nanti belum dapat memenuhi kebutuhan selama setahun, layaknya biji-biji kopi merah ranum yang hanya bisa dipanen sekali dalam setahun.

Di rumahnya, Iswadi langsung menjamu kami dengan minuman kopi dan juga air putih. Selain itu, Sri sang istri menghadirkan gorengan dari dapurnya dan kami menikmati secara lesehan. Kami duduk beralas karpet di lantainya yang semen acian. Dari dinding rumahnya yang berbahan papan, angin sejuk masuk melalui jendela menemani cerita pagi itu.

Musim panen kopi tutur Iswadi, dimulai sekitar Mei akan berakhir sekitar Agustus atau September. Sebab, kematangan buah kopi tidak serentak. Sehingga petani dapat lebih bersabar menunggu sampai buah hampir rata tingkat kematangannya. Mereka biasanya, memanen saat buah sudah dominan matang

dengan warna merah penuh dan segar. Pada kondisi ini, diyakini kondisi buah kopi sudah matang dengan sempurna sehingga diprediksi memiliki cita rasa yang pas. “Kami *mutirgh* buah sekali dalam setengah bulan, dan buah akan habis sekitar Agustus atau September,” kata Iswadi saat dijumpai di kediamannya.

Usai panen, biasanya para petani menyisakan sebagian biji kopi untuk dikonsumsi pribadi. Biji-biji tersebut diolah dengan proses seperti dijemur, digoreng dan digiling. “Kami biasa menjemur kopi depan rumah, sesudahnya *ngiruh* (menyangrai) kopi sekitar 25-50 kg lebih dari total satu ton untuk disimpan sendiri. Selebihnya akan dijual ke agen,” imbuhnya. Buah kopi yang akan dikonsumsi sendiri biasanya digiling sendiri dengan upah Rp 4000 per Kg. Namun di tangan pengusaha kopi rumahan, kopi bubuk kemasan dijual rata-rata Rp 40.000 per kg. Meski sudah memanen kopi, Iswadi dan istrinya tidak bermalas-malasan. Mereka pun menanam sayuran *gambas* atau oyong (*luffa acutangula*) di lahannya seluas sekitar 20x10 meter<sup>2</sup> dan sedikit tanaman padi di lahan seluas seperempat hektare. Uang yang didapat dari hasil panen sayuran tersebut dapat menutupi kebutuhan harian. Jenis sayuran suku labu-labuan ini dipanen setelah berusia 40 hari. “Kita sempat sekali mendapatkan bantuan bibit padi dan kami harap berkesinambungan. Jika musim bagus, hasil panen kami simpan untuk makan sehari-hari dan yang dijual sebanyak 20 kg seharga sekitar Rp 8000- 9000 per kg,” tukasnya.

Kembali ke kopi Pagaram, Iswadi tak memungkiri belum pernah merasa bosan menyeduh kopi dan menikmatinya setiap hari. Sejak dulu kopi Pagaram dikenal dengan kekhasan cita rasa dan aroma kopi robusta yang dihasilkan cukup sedap, kental, gurih dan nikmat. Wajar saja, batang-batang kopi tumbuh pada tanah yang subur di alam pegunungan Dempo

yang sejuk. Ribuan hektare kebun kopi rakyat ini berada di wilayah Kecamatan Pagaralam Selatan, Pagaralam Utara, Dempo Selatan, Dempo Tengah dan Kecamatan Dempo Utara yang tentu saja berlatar belakang Gunung Dempo berketinggian 3159 mdpl .

Namun disayangkan, sebagian besar produksi kopi Pagaralam yang menjadi surga kopi bagi Sumatera ternyata dijual mentah ke daerah lain terutama Lampung. Sebagian kecil dijual ke Medan, Jakarta dan Palembang. Di satu sisi, sejak awal kualitas biji kopi Pagaralam cukup baik. Namun sempat mengalami penurunan lantaran pola perawatan yang menggunakan pestisida. Pemerintah pun saat ini tengah gencar menyosialisasikan agar kopi bersih maka dapat menggunakan pupuk organik dan mengubah perilaku pembasmian rumput menggunakan pestisida kimia.

Seperi diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Disperindag Kota Pagaralam Rano Pahlefi menjelaskan, hampir seluruh petani menjual kopinya kepada para agen di Pagaralam dan siap jual ke Lampung, Palembang, dan Jakarta. Harga pasaran kopi Robusta Pagaralam sekitar Rp 17.000-20.000 per Kg. Dia menambahkan, para petani kopi yang tergabung dalam UKM dan IKM dilatih dalam pengolahan, pengemasan, dan *packaging*. "Pemerintah mengajak petani untuk menjaga kualitas kopi agar berkualitas sehingga harga dapat bersaing di pasar nasional bahkan ke depan dapat saja di ekspor. Di antaranya dalam perawatan tanaman dapat menggunakan bahan organik dan hindari pestisida," imbuhnya.

Di lain pihak, H. Dimiyati Rais, *agen besar kopi di Pagaralam* mengaku, potensi produksi kopi diprediksi lumayan baik tahun ini. Untuk harga, diprediksi sekitar Rp 16.000-19.000 per Kg. Untuk harga sekitar Rp 19.250-19.500 per kg. "Namun saat ini posisi penjualan agak susah lantaran pasaran ekspor

sedang *vacuum*. Namun kopi yang saya beli di Pagaralam ini 100% saya jual ke Lampung. Seperti tahun lalu, saya dapat menjual sekitar 500 truk biji kopi ke Lampung,"kata dia.





**Dandhy Dwi Laksono**

Mengawali karirnya sebagai jurnalis di tahun 1998, ia kini menjadi *video journalist* dan telah membuat setidaknya 23 dokumenter video bersama WatchDoc, serta menulis berbagai buku jurnalistik seperti *Jurnalisme Investigasi*,

*Buku Panduan Meliput Usaha Kecil Menengah*, dll. Sebagai jurnalis, Dandhy telah mendapatkan berbagai penghargaan atas karyanya, salah satunya seperti *People Choice Award* di Festival Dokumenter Asia Tenggara tahun 2012 untuk karya "Alkinemokiye". Ia

bisa dihubungi melalui email [deenda1@yahoo.com](mailto:deenda1@yahoo.com).

# SAMIN VERSUS SEMEN

(BAGIAN I)

Dimuat dalam The Nat Geo Time, 9-15 Februari 2015

oleh: **DANDHY LAKSONO**

**J**oko Prianto alias Prin (32) memutuskan tak pulang ke rumah. Ia mengamankan diri ke kampung-kampung tetangga dan terus berpindah-pindah. Hari itu, 16 Juni 2014, ia merasa sedang dicari-cari polisi dan tentara, meski mengaku tak melakukan tindak pidana.

Enam pemuda lainnya, dan seorang perempuan, telah ditangkap karena membawa kamera saat terjadi aksi unjuk rasa menolak pabrik semen. Dengan dalih menjadi wartawan palsu, polisi pun mencokok mereka meski beberapa jam kemudian dilepaskan.

Unjuk rasa 16 Juni itu dilakukan seratusan perempuan dengan cara memblokade jalan dengan berbagai alat pertanian dan rumah tangga, termasuk lesung untuk menumbuk gabah. Polisi lalu membubarkan paksa aksi para ibu itu. Yang dibubarkan pun bergeming dengan mendirikan tenda di pintu masuk tapak pabrik, hingga kini (Januari 2015).

Menurut Prin, ketujuh warga yang ditangkap memang bukan dan tidak mengaku wartawan. Mereka adalah bagian dari tim dokumentasi warga yang menolak kehadiran pabrik semen di Desa Tegaldowo dan Timbrangan, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang (Jawa Tengah).

Tapi tuduhan pada Prin lebih berat: ia dianggap telah memprovokasi warga untuk mengganggu seremoni peletakan batu pertama (*ground breaking*).

“Saya lahir di sini. Saya asli orang sini. Sawah saya ada di sini. Bagaimana mungkin saya dituduh provokator. Kalau saya ikut menolak semen, memang iya. Tapi aneh kalau dibilang provokator,” kata Prin, pertengahan Januari lalu.

Pabrik yang sedang dibangun itu milik PT Semen Indonesia, perusahaan pelat merah hasil kongsi sejak 2012 antara PT Semen Gresik, PT Semen Padang, dan dan PT Semen Tonasa. Tapak pabrik itu berdiri di atas lahan 55 hektar milik Perum Perhutani KPH Mantingan yang disebut-sebut telah ditukar-guling. Ini adalah bagian dari rencana penambangan karst (batu gamping) seluas 900 hektar yang akan berlangsung selama 130 tahun di sepanjang pegunungan Kendeng.

Di luar lahan Perhutani, ada sawah-sawah produktif milik warga yang ditanami padi dan jagung, yang mengandalkan sumber pengairan dari kawasan karst atau yang secara geologis dikenal sebagai Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih. CAT artinya tempat masuk dan meresapnya air, sekaligus cadangan air dan munculnya mata air di dalam sistem geologi atau kawasan yang sama.

Menurut kajian Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), CAT Watuputih mampu menyuplai air sebanyak 51 juta liter per hari dari 109 mata air. Dari debit sebesar itu, 10 persennya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan warga di 14 kecamatan, dan sisanya untuk pengairan sawah. Tak heran bila pada tahun 2011, lahir Keputusan Presiden tentang penetapan Cekungan Air Tanah di mana CAT Watuputih termasuk kategori B yang wajib dilindungi.

Merasa di atas angin, didampingi para pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), warga Tegaldowo dan Timbrangan kini tengah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, agar membatalkan izin penambangan semen yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Rembang.

## **KEBUTUHAN SEMEN VS PERTANIAN**

Pemerintah dan industri semen yang digugat juga punya argumen. Menurut presentasi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, Teguh Dwi Paryono, izin penambangan semen di Rembang tidak akan mengganggu suplai air tanah bagi pertanian warga, karena dilakukan di zona kering.

Zona kering adalah lapisan teratas dari kawasan karst yang tebalnya 270-300 meter. Kendati begitu, izin hanya diberikan untuk penambangan hingga kedalaman maksimal 79 meter sesuai Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Di bawah itu, ada zona peralihan atau zona penyangga, sebelum akhirnya zona basah yang berisi cadangan air.

“Teknik penambangan tersebut tidak akan mengurangi fungsi imbuhan air tanah, tapi malah dapat meningkatkan fungsi daerah tersebut sebagai kawasan imbuhan,” papar Teguh dalam presentasinya.

Tak heran bila pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberi lampu hijau kepada investasi semen di wilayahnya. Sebagian besar memanfaatkan barisan pegunungan Kendeng yang menyimpan deposit batu gamping dan membentang di enam kabupaten: Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Blora, dan Grobogan.

Industri semen yang kini tengah melakukan kegiatan

eksplorasi dan produksi di Jawa Tengah antara lain PT Semen Indonesia, PT Holcim Indonesia, PT Vanda Prima Listri, PT Semen Grobogan, PT Semen Gombang, dan PT Sahabat Mulia Sakti, yang tak lain adalah anak usaha PT Indocement Tungal Prakarsa.

Menurut pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kebutuhan semen tahun 2014 mencapai 64 juta ton dan akan terus meroket hingga menembus lebih dari 70 juta ton pada tahun 2016. Dari permintaan sebesar itu, 58 persen berasal dari Jawa dan 21 persen dari Sumatera.

Di sisi lain, lahan pertanian produktif yang sedang dipertahankan sebagian warga di kaki pegunungan Kendeng juga signifikan. Menurut data JMPPK, terdapat lebih dari 10.000 hektar lahan pertanian yang dipertaruhkan. Padahal, setiap hektar sawah dapat menghidupi 146 orang, termasuk tenaga kerja. Itu belum termasuk 4,7 juta jiwa yang hidup di lima kabupaten yang menggantungkan sumber air tanah dari Pegunungan Kendeng.

“Satu pabrik semen hanya sanggup menampung 2.000 orang di masa konstruksi, dan 1.000 orang di saat produksi. Dibandingkan dengan pertanian yang menghidupi puluhan ribu orang, jelas tidak ada apa-apanya,” kata Prin yang kini mengelola lahan setengah hektar warisan almarhum ayahnya.

Dalih peningkatan kesejahteraan juga sulit diterimanya.

“Kami ini tidak miskin. Kami ini sejahtera dari pertanian. Saya menanam jagung tiga bulan saja dapat 7,3 juta rupiah. Itu pas harga jagung 1.900 per kilogram,” sambungnya bersemangat.

Setiap tahun, lahan setengah hektarnya ditanami bergiliran antara padi, jagung, dan tembakau. Bila sedang musim tembakau dan kondisinya bagus, ia mengaku pernah

untung bersih 30 juta rupiah hanya dengan modal produksi 10 juta untuk empat bulan masa tanam hingga panen.

“Kalau jadi buruh di pabrik semen apa bisa punya pendapatan seperti itu? Sudah tanah hilang, juga risiko dipecat atau pabriknya tutup,” pungkasnya.

Tapi sejak 2012, sawahnya telantar. Prin lebih sering pulang pergi Rembang-Semarang untuk menghadiri sidang-sidang PTUN. Ia juga kerap berkunjung ke Kabupaten Pati untuk menimba pengalaman dari komunitas Sedulur Sikep (Samin) yang pernah memenangi gugatan PTUN melawan PT Semen Indonesia tahun 2009.

## **TERTUTUP**

Siang terik memanggang di pusat Desa Tegaldowo. Sebuah warung memajang spanduk besar bertuliskan: “Warung Makan Pro Semen”. Suara warga memang terbelah. Kami mendatangi warung itu untuk mendengarkan versi mereka. Tapi seorang perempuan pemilik warung enggan diwawancarai.

“Saya tidak tahu siapa memasang spanduk itu, Mas,” katanya dalam bahasa Jawa.

“Apakah ibu tahu siapa yang memasangnya, agar bisa kami temui?”

“Wah, saya tidak tahu,” pungkasnya.

Spanduk lain dengan tulisan yang sama juga kami temui di warung lain yang siang itu tutup.

Sementara di pintu pabrik, satu peleton polisi dan satpam siaga berjaga. Tak tampak tentara berpakaian dinas. Salah seorang personel keamanan mengaku sebagai pensiunan Brimob yang pernah ditempatkan di Kelapa Dua, Depok.

Mereka menolak kedatangan kami yang bermaksud meminta izin mengambil gambar dan melakukan wawancara kepada ibu-ibu yang sedang berada di tenda. Permintaan untuk bertemu pihak manajemen dan penanggung jawab lapangan, juga ditolak dengan alasan sedang sibuk dan belum membuat janji.

Meski sedang digugat di PTUN, pabrik berkapasitas 3 juta ton per tahun itu terus dibangun. Yang dipertaruhkan adalah investasi 3,7 triliun rupiah yang sebagian adalah kredit dari Bank Mandiri. Di depan tenda yang berisi selusin perempuan yang sedang protes itu, truk dan alat berat hilir mudik mengejar target operasi tahun 2016.

Dari 900 hektar areal penambangan yang direncanakan, sudah ada sekitar 200 hektar tanah yang berhasil dibebaskan. Dari sisa yang belum berhasil dibeli itu, ada setengah hektar tanah Joko Prianto yang kini sedang belajar dari komunitas Samin. *(bersambung)*

# SAMIN VERSUS SEMEN

(BAGIAN 2)

Dimuat dalam The Nat Geo Times, tanggal 16-22 Februari 2015  
oleh: **DANDHY LAKSONO**

**G**unretno (46) mengarahkan kamera telepon genggamnya ke wajah seorang pria yang menuntun sepeda tua. Pria itu sama sekali tak terganggu. Ia langsung terlibat obrolan bersama Gun dan tiga orang lainnya. Lokasinya di tapal batas areal penambangan sebuah pabrik semen, di Desa Koro, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

“Dilarang Masuk Area Tambang PT Semen Indonesia Tanpa Izin,” tulis sebuah peringatan yang dipahat di tugu bersemen setinggi dua meter.

Siang itu, di akhir Januari 2015, Gunretno ditemani Joko Prianto (32) berkunjung ke Tuban. Gunretno adalah petani asal Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sedangkan Prin adalah petani asal Tegaldowo, Kabupaten Rembang. Keduanya pernah dan sedang bersengketa dengan pabrik semen.

Mereka menempuh tiga jam perjalanan untuk sampai di Desa Koro, Tuban. Di sini, 20 tahun lalu, sebuah pabrik semen dari Gresik mulai beroperasi.

Penjaga portal areal tambang itu adalah seorang pria berusia 70-an tahunan yang digaji 750 ribu rupiah per bulan.

Tahun 1984, ia mengaku telah melepas tanahnya seluas 1,5 hektar untuk penambangan semen.

“Waktu itu ya sebenarnya saya terpaksa, karena ditakut-takuti tidak akan dikasih jalan menuju lahan. *Lha* kalau tidak ada jalan, terus mau lewat mana. Ya, sudah akhirnya semua dijual,” katanya dalam bahasa Jawa, mengenang peristiwa 30 tahun silam.

Saat itu, tanahnya dihargai 600 rupiah per meter persegi.

Pria kedua adalah seorang pemuda lulusan SD yang baru selesai mengumpulkan daun jagung untuk pakan ternak.

“Dulu dijanjikan kerja, tapi nyatanya kami sekarang tidak bisa bekerja karena alasan ijazah. Zaman itu (Orde Baru) siapa yang berani bilang tidak, Mas,” tuturnya.

Gunretno dan Prin tekun menyimak. Kamera video di teleponnya tetap merekam.

Pria ketiga yang baru bergabung, memperkenalkan diri bernama Gunomat. Ia tak lebih muda dari pria pertama.

“Tanah saya sudah habis. Pelan-pelan dijual oleh sembilan anak saya. Sekarang sudah tidak punya apa-apa. Uangnya dibelikan sepeda motor. Barang seperti itu, ya cepat rusak. Sekarang tidak jadi apa-apa,” paparnya dalam Jawa.

Ketiga pria itu makin panjang bertutur. Termasuk dampak ledakan dinamit yang merusak genting dan lantai rumah warga.

“Janji mendapat pekerjaan tidak ditepati. Tanah pertanian sudah *kadung* dijual. Belum lagi polusi dan rumah-rumah yang retak akibat ledakan dan tidak mendapat kompensasi. Kami tidak ingin semua itu terjadi di Pati dan Rembang,” kata Gun menyimpulkan.

## **GERAKAN SAMIN**

Sejak 2006, Gunretno dan komunitas Sedulur Sikep menolak rencana pembangunan pabrik semen di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Areal yang akan ditambah mencapai 2.000 hektar. Padahal, di areal itu terdapat sekitar 1.400 hektar lahan pertanian produktif yang menjadi tulang punggung ekonomi warga.

Sedulur Sikep sendiri adalah penganut ajaran Samin Surosentiko alias Raden Kohar, seorang tokoh asal Blora yang tercatat pernah melakukan pembangkangan terhadap pemerintah kolonial Belanda pada 1890. Samin menolak pajak tanah yang dianggap terlalu membebani petani.

Sejak itu, istilah 'Samini' identik dengan pembangkangan atau karakter keras kepala. Mereka menolak disebut Kejawan, dan bila diizinkan pemerintah, lebih memilih menulis kolom agama di KTP: Adam.

Gunretno dan adik perempuannya, Gunarti, adalah keluarga petani yang memelopori penolakan terhadap rencana ekspansi PT Semen Indonesia di Kabupaten Pati antara 2006 sampai 2009, ketika memenangi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung.

Kemenangan 200-an kepala keluarga Sedulur Sikep di Sukolilo, digenapi dengan ditetapkannya kawasan karst pegunungan Kendeng di Sukolilo sebagai kawasan lindung oleh pemerintah. Namun setelah mundur dari Pati, pada tahun 2012, PT Semen Indonesia justru mendapatkan izin di Tegaldowo, Kabupaten Rembang. Tempat di mana Joko Prianto alias Prin menggantungkan hidupnya dari pertanian.

Sejak itu, Prin kerap mondar-mandir dari Rembang ke Pati untuk mempelajari gerakan sosial dari komunitas Sedulur Sikep. Mereka lalu melakukan studi banding ke Gresik atau

Tuban untuk melihat bagaimana kehidupan para petani setelah beberapa dekade penambangan.

“Sedulur Sikep itu tidak boleh berdagang. Jadi kami hanya hidup dari hasil pertanian. Kalau satu-satunya sumber penghidupan kami berubah menjadi pabrik semen, lalu bagaimana kami hidup?” ujar Gunarti dalam Jawa ‘kasar’ (*ngoko*).

Sejarah Samin adalah sejarah perlawanan. Bahkan hingga ke bahasa. Mereka menolak menggunakan bahasa Jawa halus (*krama*) yang mencerminkan stratifikasi sosial.

Selain melarang berdagang atau jual beli, ajaran Samin juga menolak sistem pendidikan sekolah formal. Tiga anak Gunarti, tak ada yang bersekolah. Sebagai gantinya, ia mengajarkan baca tulis di rumah.

“Sekolah anak-anak kami itu ya di sawah. Belajar pertanian,” pungkasnya.

Tak hanya membantu warga Rembang, Gunretno dan Gunarti juga membantu warga kecamatan tetangga yang sedang berhadapan dengan pabrik semen yang lain: PT Sahabat Mulia Sakti (SMS). Anak perusahaan PT Indocement Tunggal Prakarsa itu sedang menjajaki penambangan di Kecamatan Tambakromo dan Kayen.

Di perkampungan, warga memasang bambu runcing dan aneka poster yang menolak kehadiran pabrik semen. Tulisan “Tolak Semen” juga ditempel di setiap pintu rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu dan berwujud *Joglo* (rumah tradisional Jawa).

Pengaruh gerakan Sedulur Sikep telah merasuk ke warga Tambakromo dan Kayen. Pada suatu siang, di pertengahan Januari 2015, Gunretno hanya membutuhkan setidaknya dua jam untuk mengumpulkan seribuan massa.

Mereka yang sedang bekerja ladang atau memasak di rumah, langsung menghentikan aktivitasnya begitu pengeras suara di masjid, mengimbau warga berkumpul di tengah sawah.

Di sana, Gunretno dan kawan-kawannya telah menyiapkan spanduk hitam sepanjang 20 meter yang ditemplei kertas bekas membentuk sebuah kalimat. Dari ketinggian 30 meter, barulah tulisan itu lebih mudah terbaca: "Tolak Pabrik Semen di Jawa".

"Silakan membangun pabrik semen di tempat lain yang harga semennya mahal. Agar lebih dekat ke konsumen dan harganya murah. Jawa ini lumbung pangan. Kalau negara krisis semen, bukan masalah. Kalau krisis pangan?" tanya Gunretno diplomatis.

Sementara itu di Rembang, Prin didapuk berbicara di hadapan seratusan warga yang setiap Jumat malam melakukan pertemuan rutin selama proses persidangan di PTUN. Kaum pria dan perempuan membawa anak-anak mereka dalam pertemuan hingga larut malam.

"Kita harus saling menguatkan. Perjuangan ini sudah tinggal sejengkal lagi," katanya.

Joko Prianto, lelaki 32 tahun itu sendiri mengaku sedang berpisah dengan istrinya karena mertuanya termasuk kelompok warga yang mendukung kehadiran semen, dan telah menjual tanah seluas 1,5 hektar.

Ketika artikel ini ditulis, 5 Februari 2015, Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang sedang bersidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. (*tamat*)



**Cornelius Helmy**

Jurnalis asal Bandung bekerja untuk Harian Kompas. Pria kelahiran Sukabumi ini bisa dihubungi melalui email [opetmyown@yahoo.com](mailto:opetmyown@yahoo.com)

## MEMBANGUN PANGAN

# UPAYA MERENDAS TETAP BERGELORA

Dimuat dalam Kompas, tanggal 15 Februari 2016

Oleh: **CORNELIUS HELMY**

**S**ekadar mengandalkan kesuburan tanah vulkanik saja tidak cukup bagi sebagian petani Indonesia untuk unjuk gigi. Dihantam mekanisme pasar yang tidak pasti, mereka mudah limbung hingga hilang konsentrasi saat hendak memperbaiki kualitas dan hasil panennya.

Tahun 2015 menjadi saat paling buruk bagi Endang Mulyadi (48), petani asal Kampung Babakan Cieurih, Desa Margamekar, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sejak menjadi petani 35 tahun lalu. Ia dan kelompok tani asuhannya, Putra Cinta Asih, merugi hingga Rp 2 miliar. Keadaan ini mengulang fakta muram empat tahun lalu, kala itu ia rugi Rp 1,7 miliar.

"Setelah susah payah mengembalikan utang, kini kami dapat cobaan lagi," kata Endang di Pangalengan, akhir Januari.

Putra Cinta Asih adalah kelompok tani sayur terbesar di Pangalengan. Selain memanfaatkan lahan sendiri, kelompok tani ini menyewa lahan bekas perkebunan teh tidak produktif dengan total luas 80 hektar. Di atas tanah vulkanik Bandung selatan, 625 tenaga kerja menggantungkan hidupnya.

Endang mengatakan, penyebabnya beragam. Hama dan

perubahan cuaca ekstrem mengganggu hasil panen. Kondisi itu diperparah mekanisme pasar yang tak pasti, yang membuat tengkulak mudah memegang kendali.

“Tahun lalu perubahan cuaca dan tawaran tengkulak membuat kami terpuruk. Dari rata-rata panen sayur 18 ton per hektar, tahun lalu panen kurang dari 10 ton per hektar. Harga juga merosot. Tomat, misalnya, dari harga Rp 5.500 per kilogram dibeli tengkulak hanya Rp 500 per kilogram,” ujarnya.

## **KERJA SAMA**

Harapan mulai muncul sejak mereka menandatangani kontrak kerja sama dengan PT Rajatani Agro Nusantara di akhir 2015. Kontrak berdurasi setahun itu menjamin hasil panen petani dibeli dengan harga tinggi dan relatif stabil. Dirintis Anne Sri Arti dan pengusaha Rachmat Gobel, Rajatani mencoba menghadirkan kedua hal penting itu tetap ada dan dinikmati petani.

Selain Pangalengan, Rajatani juga bekerja sama dengan petani mangga di Cirebon, petani salak di Wonosobo, petani nanas di Pematang, hingga durian di Bali. Hasil panen petani nantinya disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pasar premium hingga perusahaan katering berskala besar.

“Kami sepakat menjaga semangat petani sebagai ujung tombak pangan adalah tujuan paling utama,” kata Anne.

Anne mencontohkan harga cabai merah yang dibeli tengkulak Rp 13.000-Rp 15.000 per kilogram, Rajatani membelinya berkisar Rp 17.500-Rp 18.000 per kilogram. “Penetapan harga merupakan kesepakatan bersama petani dan tidak kaku. Saat harga di pasar lebih tinggi daripada nilai kontrak awal, kami akan menyesuaikannya dengan harga

lebih tinggi," kata Anne.

Selain memberikan rasa aman, edukasi penanaman yang baik juga dilakukan. Saat membeli mangga harumanis matang pohon dari Cirebon, Rajatani menyarankan petani menjual buah matang pohon 95-100 persen atau memberi waktu dua minggu lebih lama dari waktu panen konvensional.

Cara itu, menurut Anne, diyakini ampuh meningkatkan harga jual mangga. Jika sebelumnya hanya dibeli Rp 7.000 per kilogram oleh tengkulak, petani bisa menjual mangga matang pohon hingga Rp 29.000 per kilogram.

## **MELEGAKAN**

Di tengah peningkatan jumlah penduduk yang memicu ketersediaan pangan, keadilan harga dan jaminan pasar sangat dibutuhkan petani. Di Jabar, konsep serupa muncul dan diharapkan menjadikan petani garda terdepan penghasil bahan pangan.

Kelompok Tani Cipta Mandiri di Kampung Cibeungang, Desa Ciburial, Kecamatan Cimendan, Kabupaten Bandung, umpamanya. Mereka muncul bersama konsep "Pasar Kecil" lewat sayur organik. Sejak setahun terakhir, Adang Parman (54), petani Cipta Mandiri, mengurangi ketergantungan penjualan sayur pada tengkulak. Ia menyalurkan langsung panen sayur kepada konsumen. "Kami pun bisa mendapatkan untung lebih besar," kata Adang.

Petani di Desa Mandalamekar, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, juga menjadi contoh, lewat budidaya cabai merah rahong. Kepala Desa Mandalamekar Yana Noviani mengatakan, dengan membeli alat angkut sendiri, mereka bisa memotong lapisan mekanisme pasar yang merugikan.

“Ternyata ada Rp 1 juta yang hilang kalau mengirim cabai 200 ton per minggu ke Pasar Kramatjati, Jakarta. Sekarang, setelah mengirimkannya sendiri, keuntungan yang pernah hilang bisa kami dapatkan,” kata Yana.

Warga Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dan Sarongge, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, bersama Wangsa Jelita, produsen sabun dan parfum berbahan bunga mawar, menerapkan hal serupa. Bukan di bisnis pangan, melainkan kosmetik.

Salah satu pendiri Wangsa Jelita, Nadya Saib, mengatakan, pihaknya membeli mawar dengan panjang batang kurang dari 40 sentimeter, yang sebelumnya dihargai murah, bahkan tak laku dijual. Untuk meningkatkan pendapatan, istri petani mawar juga diajari teknik pembuatan sabun dan parfum.

“Mengandalkan penjualan terbesar melalui internet, produk Wangsa Jelita sampai ke Singapura,” katanya.

## **OPTIMISTIS**

Ketika pasar yang pasti sudah ada di depan mata, para petani optimistis bisa menanam lebih banyak dengan hasil berkualitas.

Elit (49), bersama delapan ibu-ibu asal Desa Margahayu, Kecamatan Pangalengan, di antara tumpukan bibit kentang, pun terus merenda asa. Akhir Januari lalu, saat ditemui, sambil duduk berkeliling di salah satu sudut gudang milik Kelompok Tani Putra Cinta Asih, Elit dan rekan-rekannya tengah memilah bibit terbaik di antara getah kentang yang mudah memicu gatal saat terkena kulit. “Saya justru khawatir kalau tidak bertemu getah kentang. Itu sama saja dengan minimnya penghasilan karena tidak ada kentang yang harus dipilah,” kata Elit, pekerja Kelompok Tani Putra Cinta Asih

sejak lima tahun lalu.

Elit sudah merasakan pengalaman buruk itu tahun lalu. Saat bisnis pertanian di Pangalengan anjlok, ia kena imbasnya. Kalau sebelumnya ia bekerja lima hari dalam seminggu, tahun lalu ia kerap bekerja hanya dua sampai tiga hari saja.

“Tahun ini sepertinya beda. Hari kerja saya normal lagi,” kata Elit, yang dibayar Rp 17.000 per hari, sebagai upah bekerja pada pukul 06.30-12.00.

Endang Mulyadi yang berada di tempat yang sama ikut tersenyum mendengar harapan itu. Ketika pasar yang pasti sudah ada di depan mata, ia optimistis bisa menanam lebih banyak lagi dengan hasil yang juga lebih berkualitas. “Setelah disibukkan mencari pasar, kini saatnya fokus meningkatkan kualitas panen,” katanya.



**Cornelius Helmy**

Jurnalis asal Bandung bekerja untuk Harian Kompas. Pria kelahiran Sukabumi ini bisa dihubungi melalui email [opetmyown@yahoo.com](mailto:opetmyown@yahoo.com)

# PETANI ORGANIK TETAP SEJAHTERA DI ERA PERUBAHAN IKLIM

Dimuat dalam Kompas, tanggal 4 November 2015

Oleh: **CORNELIUS HELMY**

**T**ahun ini, perubahan iklim ekstrem kembali menghadirkan nestapa pangan dan kesejahteraan. Namun, bagi sebagian petani dan pembudidaya ikan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, hal itu bukan alasan untuk berhenti berkarya. Lewat proses panjang, kerja keras mereka memberi contoh.

Deru mesin penggilingan padi di pabrik pengolahan Gabungan Kelompok Tani Simpatik di Kampung Cidahu, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, tidak terdengar, Rabu (28/10) siang. Suara bising mesin berganti kesibukan belasan petani memindahkan ratusan kardus berisi beras organik ke truk di tepi jalan besar.

Uho Buchori (40), petani Karangjaya, Kecamatan Manonjaya, termasuk di dalam kesibukan itu. Udara lembab Tasikmalaya siang itu membuat keringatnya mengalir deras. Namun, ia terus mengangkat kardus coklat seberat 10 kilogram. "Total ada 16,8 ton untuk ekspor ke Italia," kata Uho.

Ia sangat berhati-hati memindahkan kardus berisi beras berwarna merah, merah muda, dan hitam itu. Wajar jika Uho begitu perhatian. Beras dengan nama komersial Rain Forest

itu sebagian besar hasil panen Uho bersama petani Manonjaya lain. Di tengah musim kemarau panjang, sawah padi organik di Manonjaya tetap panen 6,5 ton hingga 8 ton per hektar, atau hampir mencapai dua kali lipat sawah konvensional.

“Kemarau sedikit banyak memengaruhi pasokan air. Namun, kami bisa menghemat air melalui metode organik dan tetap ekspor tahun ini,” katanya.

Dirintis tahun 2003, padi organik Tasikmalaya secara perlahan menjadi primadona. Sudah ada 3.000 petani organik atau sekitar 1 persen dari total petani Tasikmalaya, mereka menggarap sekitar 8.000 hektar sawah. Luas sawah di Tasikmalaya 51.000 hektar.

Enam tahun lalu, petani melangkah lebih jauh, saat mengajukan sertifikasi lahan dari The Institute for Marketology (IMO). Sertifikasi itu menjadi syarat petani untuk ekspor. Tahun ini, 256 hektar sawah sudah lolos sertifikasi.

## **BANYAK NEGARA**

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Simpatik Uu Saeful Bahri mengatakan, negara pertama penerima beras Tasikmalaya adalah Amerika Serikat sebanyak 18 ton pada tahun 2009. Tahun berganti, semakin banyak beras yang dikirimkan ke banyak negara.

Jumlahnya bertambah dengan negara bervariasi setiap tahunnya. Periode Agustus 2009 hingga Oktober 2015, sebanyak 729,8 ton dikirim ke Belgia, Belanda, AS, dan Jerman. Bukan perkara mudah, karena negara-negara itu tidak sembarangan menerima bahan pangan dari negara lain.

Hasil manis itu tidak lepas dari keputusan petani organik berdamai dengan alam. Uu mengatakan, petani organik meninggalkan pestisida kimia yang rentan menurunkan

kualitas tanah dan bibit padi.

Pupuk kimia diganti kotoran ternak bercampur air nira, gula, dan air kelapa, yang efektif menyuburkan mikroorganisme penyubur tanaman. Petani juga hanya mengusir hama, bukan membunuhnya. Mereka menggunakan air biji dan daun sirsak untuk hama wereng, air tembakau untuk hama penggerek batang, dan buah klewek dan bratawali untuk hama merah.

"Kami juga berusaha mengembalikan takdir padi sebagai tanaman butuh air, bukan terendam air. Saat musim kemarau, kami bisa menghemat penggunaan air," katanya.

Menurut Kepala Bidang Produksi Padi dan Palawija Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya Hety Heryati, penerapan jarak tanam 25 sentimeter antarbenih petani organik juga punya keuntungan ganda. Selain memudahkan penyerapan nutrisi, itu merangsang pertumbuhan akar padi. Akar tumbuh subur sepanjang 50 sentimeter hingga 60 sentimeter, membuat padi mampu mencari sumber air terbatas.

"Kekuatan padi organik terbukti pada kemarau tahun ini. Dari sekitar 5.000 hektar sawah di Tasikmalaya yang kekeringan, sebagian besar adalah sawah konvensional," katanya.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Hasil Sembiring, saat melepas beras Tasikmalaya menuju Italia, mengatakan, sukses petani organik itu memberi arti penting bagi Indonesia. Selain meningkatkan penghasilan petani, ekspor memberi semangat pengelolaan potensi besar pertanian.

## **TETAP TERJAGA**

Terpisah hanya 7 kilometer, hidup rukun bersama alam

juga menjaga 30 pembudidaya ikan nila di Kampung Cicurug Harja, Desa Indrajaya, Kecamatan Sukaratu, Tasikmalaya, tetap sejahtera di musim kemarau. Pasokan air dari Gunung Galunggung melalui Sungai Batu Masigit membuat petani ikan yang tergabung dalam Kelompok Giri Harja tetap terjaga. Kondisi itu kontras dengan nasib sebagian petani lain di Tasikmalaya yang terdampak kemarau dan pencemaran limbah tambang pasir.

Sekretaris Kelompok Giri Harja, Asep Sutisna (41), mengatakan, pada musim kemarau produktivitas kolam tidak terganggu. Dengan luas kolam 1,5 hektar untuk 90 kolam, petani memanen 4,5 kuintal ikan per hari. Ikan dijual Rp 15.000-Rp 25.000 per kilogram atau jauh lebih mahal daripada harga pokok pembelian sekitar Rp 12.000 per kilogram. "Keuntungan paling sedikit petani ikan Rp 40.000-Rp 50.000 per orang per hari," kata Asep.

Aep Saepudin (52), juga petani ikan Cicurug Harja, mengatakan, salah satu kunci keberhasilan adalah metode ramah lingkungan. Banyak pohon baru ditanam di bantaran sungai. Cara itu ampuh menjaga pasokan air saat kemarau dan mencegah longsor di musim hujan.

"Pemberian pakan organik juga memegang peran penting menjaga produktivitas panen ikan. Campuran dedak, sayur, dan keong mas membuat produktivitas kolam terjaga 1,3 kilogram per meter persegi," katanya.

Kesetiaan itu juga mengantarkan Kampung Cicurug Harja terdengar hingga Jakarta. Akhir 2014, Giri Harja menyabet penghargaan Adibakti Minabahari sebagai pembudidaya nila terbaik tingkat nasional dari Kementerian Perikanan dan Kelautan. Gelar ini melengkapi prestasi Giri Harja yang terbaik di Jabar 2012. Pilihan hidup bersama alam terbukti

menguntungkan petani dan pembudidaya ikan. Mereka sejahtera bersama alam di tengah perubahan iklim yang tidak menentu.



**Haris Firdaus**

Jurnalis kelahiran Solo, sebelumnya pernah menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret, Surakarta, tahun 2004-2009. Bekerja sebagai jurnalis Harian Kompas sejak tahun 2012 hingga sekarang, sebelumnya pernah bekerja di Majalan Gatra selama dua tahun. Ia dapat dihubungi melalui email [haris\\_firdaus@ymail.com](mailto:haris_firdaus@ymail.com).

# SUPARJIYEM: PEJUANG PANGAN DARI GUNUNG KIDUL

Dimuat dalam Kompas, tanggal 26 September 2015

Oleh: **HARIS FIRDAUS**

**S**elama hampir 20 tahun, Suparjiyem (55) memimpin ibu-ibu di kampungnya untuk menanam dan mengolah tanaman pangan yang tumbuh di sekitar mereka. Berkat kerja kerasnya, tanaman-tanaman yang kurang dikenal, seperti gadung, garut, ganyong, gembili, dan sorgum, berhasil diolah menjadi aneka produk yang bernilai ekonomi.

Sekitar 30 perempuan berkumpul di rumah Suparjiyem Desa Wareng, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (10/9) pagi. Mereka berkumpul di ruang tengah untuk belajar memasak. Namun, bahan yang mereka pakai sedikit tak lazim. "Kami memakai tanaman pangan lokal yang mungkin kurang dikenal," kata Suparjiyem.

Hari itu, perempuan-perempuan tersebut belajar membuat mi dan kaki naga ayam, makanan sejenis nugget, dari tepung berbahan sorgum (*Sorghum bicolor*). Sorgum merupakan tanaman biji-bijian yang banyak dibudidayakan di daerah beriklim panas dan kering, termasuk Gunung Kidul.

"Di dusun kami, sorgum biasanya disebut cantel.

Kadang dipakai untuk pakan ternak, tetapi ternyata bisa juga dipakai menggantikan tepung terigu sebagai bahan dasar mi," kata Suparjiyem.

Lahir dan besar di Gunung Kidul yang tandus membuat Suparjiyem mengenal beberapa jenis tanaman lokal yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Semasa kecil, dia kerap memakan tiwul, makanan yang terbuat dari singkong, sebagai makanan pokok. "Waktu saya kecil, beras itu belum mudah didapat seperti sekarang. Makanya, sampai decade 1970-an, hampir semua penduduk di desa saya mengonsumsi tiwul sebagai makanan pokok," ujar Suparjiyem.

Namun, seiring program Revolusi Hijau pada dekade 1980-an, Pemerintah Orde Baru mengintensifkan pengenalan nasi sebagai makanan pokok. Menurut Suparjiyem, waktu itu, perangkat desa melarang masyarakat mengonsumsi tiwul karena tiwul dianggap sebagai simbol kemiskinan.

"Kalau ada pamong desa yang datang ke rumah, warga biasanya menyembunyikan tiwul karena takut dimarahi. Mereka yang makan tiwul itu dianggap sebagai orang yang belum merdeka," kata perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai petani itu.

Meski dilarang, sebagian masyarakat Gunung Kidul tetap mengonsumsi tiwul secara sembunyi-sembunyi.

## **KRISIS EKONOMI**

Keinginan Suparjiyem mengolah tanaman local sebagai bahan pangan secara serius muncul saat krisis ekonomi dahsyat melanda Indonesia pada 1997. Saat itu, sebagian masyarakat di sekitarnya mengalami kesulitan

keuangan sehingga mereka tak mampu membeli beras dalam jumlah memadai.

"Waktu itu, orang-orang dari dinas pertanian sampai menyurvei ke rumah-rumah untuk mengetahui bahan pangan apa yang masih dimiliki warga," tutur ibu dua anak itu.

Saat krisis terjadi, Suparjiyem melihat banyak tanaman yang tumbuh liar di sekitar tempat tinggalnya yang ternyata bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Tanaman tersebut biasanya tumbuh di sela-sela tanaman kayu, seperti jati, mahoni, atau akasia. Dia pun mengajak para ibu di kampungnya mengumpulkan "tanaman-tanaman liar" tersebut guna diolah lebih lanjut.

Selain singkong dan sorgum, ada pula beberapa tanaman umbi-umbian yang tumbuh di Gunung Kidul, antara lain gadung (*Dioscorea hispida* Dennst), garut (*Maranta arundinacea*), ganyong (*Canna edulis* Ker), dan gembili (*Dioscorea esculenta* L). Meski masyarakat setempat sudah akrab dengan tanaman-tanaman itu, jarang yang coba mengolahnya secara serius.

"Saat saya mulai mengajak untuk mengolah tanaman-tanaman itu, beberapa tetangga agak pesimistis. Mereka bertanya, siapa nanti yang mau beli?" kata Suparjiyem.

Pada Juli 1998, Suparjiyem mendirikan Kelompok Wanita Tani Menur yang menghimpun para ibu di Dusun Wareng IV, Desa Wareng. Aktivitas utama kelompok itu adalah menanam dan mengolah tanaman-tanaman setempat menjadi bahan pangan aneka macam. Lahan untuk menanam aneka tanaman itu merupakan milik pribadi anggota kelompok tersebut.

"Saat ini, anggota kelompok kami yang aktif sebanyak

18 orang. Setiap anggota punya lahan sendiri dengan luas rata-rata 2.000 meter persegi,” kata Suparjiyem. Dia menambahkan, hasil panen dari lahan milik para anggota akan dibeli oleh Kelompok Wanita Tani Menur. Setelah panen terkumpul banyak, para anggota kelompok bersama-sama mengolahnya.

“Masa panen umbi-umbian itu biasanya sekali setahun, pada Agustus sampai September. Sesudah panen, kebanyakan tanaman itu akan kami olah menjadi tepung karena produk tersebut tahan lama,” ujar Suparjiyem yang pernah bekerja sebagai guru.

Dalam sekali panen, kelompok pimpinan Suparjiyem bisa mengumpulkan sekitar 2 kuintal garut, 4 kuintal ganyong, 7 kuintal gadung, 2 kuintal gembili, 9 kuintal singkong, dan 10 kuintal sorgum.

Harga jual produk olahan Kelompok Wanita Tani Menur sangat bervariasi. Tepung garut, misalnya, dijual Rp 18.000 per 500 gram, tepung sorgum Rp 6.000 per 500 gram, tepung ubi ungu Rp 6.000 per 250 gram, tepung pisang Rp 6.000 per 250 gram, emping garut Rp 6.000 per 200 gram, dan rengginang tiwul dijual Rp 4.000 per bungkus.

“Beberapa jenis tepung itu bisa dipakai untuk menggantikan tepung terigu. Memang harganya sedikit lebih mahal daripada tepung terigu, tetapi tepung kami kan, dihasilkan dari tanaman yang diolah dengan cara pertanian organik,” kata Suparjiyem. Produk tersebut awalnya dipasarkan kepada kenalan Suparjiyem. Lama-kelamaan, Kelompok Wanita Tani Menur menerima banyak pesanan dari beberapa kota, seperti Yogyakarta dan Jakarta. Kelompok yang awalnya tak memiliki

keuangan memadai itu pun berhasil mengumpulkan uang yang kini dipakai untuk usaha simpan pinjam bagi anggotanya.

Atas kiprahnya mengembangkan pangan lokal, pada 2013, Suparjiyem terpilih mendapatkan penghargaan Female Food Hero yang digagas Oxfam, organisasi nonprofit internasional yang, antara lain, bergerak dalam penanganan masalah kemiskinan. Selain Suparjiyem, ada enam perempuan dari sejumlah daerah di Indonesia yang mendapat penghargaan tersebut.

Direktur Program Keadilan Ekonomi Oxfam di Indonesia Dini Widiastuti mengatakan, Suparjiyem berhasil menunjukkan bahwa tanaman lokal bisa menjadi bahan pangan alternatif. Apabila upaya tersebut terus dikembangkan, ketergantungan masyarakat Indonesia pada bahan pangan yang bahan bakunya harus diimpor, misalnya tepung terigu, bisa dikurangi.

## **SUPARJIYEM**

### **Lahir:**

Gunung Kidul, 3 Agustus 1960

### **Pendidikan:**

- SD Siraman II, Gunung Kidul
- SMP Negeri I Wonosari, Gunung Kidul
- Kursus Pendidikan Guru Logandeng, Gunung Kidul

### **Pekerjaan:**

Petani

### **Organisasi:**

- Ketua Kelompok Wanita Tani Menur, Desa Wereng, Gunung Kidul

- Ketua Forum Petani Perempuan Gunung Kidul

**Penghargaan:**

Female Food Hero dari Oxfam di Indonesia Tahun 2013





**Abdullah Fikri Ashri**

Pria kelahiran Pare-pare ini kini berdomisili di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia bekerja sebagai jurnalis di harian Kompas dan dapat dihubungi melalui email [abdullahfikriashri@rocketmail.com](mailto:abdullahfikriashri@rocketmail.com)

# KETIKA GARAM ASING DIIZINKAN MASUK

Dimuat dalam Kompas, tanggal 1 Februari 2016

Oleh: **A FIKRI ASHRI**

**E**ntah kenapa pemerintah mengizinkan garam impor masuk pasar lokal, sekaligus menghapus harga patokan pemerintah. Kebijakan itu membuat garam rakyat terjun bebas. Semangat petani pun semakin rontok.

Matahari masih merangkak naik saat Kusnawi (36) melangkah cepat di antara tambak garam di Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (27/1). Dia baru selesai memperbaiki selang pada tambak-tambak ikan bandeng.

Membudidayakan ikan bandeng menjadi pilihan lain Kusnawi saat ini, selain menjadi buruh lepas pada sejumlah pabrik. Aktivitas itu dilakukan selama satu bulan terakhir. Dia meninggalkan tambak garam akibat harga yang merosot tajam.

Garam kualitas II milik Kusnawi, yang saat awal panen beberapa bulan lalu dihargai Rp 400 per kilogram, kini jatuh hingga Rp 230 per kilogram. Itu pun belum dipotong ongkos kuli angkut Rp 130 per kilogram. "Jadi, harga angkutnya lebih mahal daripada harga garam," ujar bapak dua anak itu.

Harga yang anjlok membuat petani setempat frustrasi. Ratusan ton garam dibiarkan menumpuk di sekitar tambak,

gudang, bahkan pinggir jalan raya. Hasil jerih payah petani ini hanya dilindungi terpal agar tak rusak diguyur hujan.

“Kami benar-benar kehilangan semangat memproduksi dan menjual garam. Jeri payah kami seolah tak ada harganya. Daripada makin menderita, kami coba cari peluang lain,” ungkap Kusnawi yang menjadi buruh lepas berupah Rp 30.000 per hari.

Hal serupa diungkapkan Taswan (55), petani garam, di Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Dia harus menyisihkan uang untuk mengubah tambak garam seluas 7.000 meter persegi miliknya menjadi tambak ikan bandeng. Untuk membeli bibit ikan dan biaya perawatan, ia harus mencari utang jutaan rupiah. Taswan juga mulai bekerja serabutan dengan upah Rp 15.000 per hari.

Lelaki ini sebetulnya masih menyimpan beberapa ton garam kualitas I yang diproduksi akhir tahun 2015. Jika sesuai harga patokan pemerintah (HPP) yang ditetapkan tahun 2011, harga garam ini di tingkat petani seharusnya Rp 750 per kilogram.

Namun, setelah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam diberlakukan, keberadaan HPP ditiadakan. Garam impor pun bebas masuk ke pasar domestik. Harga garam rakyat berkualitas I langsung turun hingga Rp 250 per kg. “Katanya, garamnya banyak, makanya jadi murah. Enggak tahu, dari tengkulak memang segitu harganya,” ucap Taswan.

Akibatnya, penghasilan Taswan dari usaha garam yang sebelumnya rata-rata Rp 3 juta per bulan pun merosot menjadi maksimal Rp 1,5 juta per bulan. Meski menyakitkan, Taswan terpaksa menjual garamnya dengan harga rendah kepada tengkulak karena membutuhkan uang untuk membiayai

kehidupan keluarga. Termasuk melunasi utangnya sebesar Rp 1 juta kepada tengkulak.

"Entah dari mana perhitungan harga garam ini. Mereka seenaknya memberi harga. Kami tak bisa apa-apa karena mereka yang punya pembeli," ujarnya.

Demi menghidupi keluarga, itu juga yang menjadi alasan Husein (63), petani garam di Desa Kalianyar, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jabar. Meski dengan harga Rp 200 per kilogram, dia terpaksa melepas beberapa ton. "Kami butuh makan sih, jadi dijual saja," ujarnya pasrah.

## **KEBIJAKAN TIDAK EFEKTIF**

Sebetulnya harga garam yang tidak beraturan ini kerap terjadi, tahun demi tahun. Langkah pemerintah pada tahun 2011 untuk melindungi petani dengan menerapkan harga patokan pemerintah di mana harga garam di tingkat petani Rp 750 per kilogram untuk kualitas I dan Rp 550 per kilogram untuk garam kualitas II, tetapi kebijakan itu tidak efektif. Pengawasan di lapangan nyaris tidak berjalan optimal sehingga petani tetap menderita.

Kondisi itu diperparah lagi setelah Peraturan Menteri Perdagangan No 125/2015 tentang Ketentuan Impor Garam diterbitkan. Aturan ini antara lain menghapus ketentuan harga patokan pemerintah untuk garam, menghilangkan pembatasan waktu impor, juga meniadakan kewajiban importir garam menyerap garam rakyat.

"Seandainya saja ada aturan harga tetap garam dan dilaksanakan, pasti petani dukung. Nasib petani bisa lebih baik. Tapi, apa daya petani," kata Husein.

Para petani, menurut dia, juga mulai memproduksi garam berkualitas setelah mendapat bantuan teknologi geomenbran

dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahkan, dari total produksi garam tahun 2015 sebanyak 3,2 juta ton, 2,92 juta ton merupakan garam rakyat, sisanya diproduksi PT Garam.

Di Kabupaten Cirebon, menurut data dinas kelautan dan perikanan (DKP) setempat, produksi garam pada 2015 sekitar 440.503 ton. Jumlah itu naik dibandingkan dengan 2014 sekitar 314.526 ton. Saat itu, harga garam Rp 400 per kilogram.

Kepala Seksi Pengembangan Usaha Kelautan dan Perikanan DKP Kabupaten Cirebon Masduqi berharap perbaikan kualitas garam tersebut juga dibarengi dengan harga yang baik bagi petani.





**Akbar Tri Kurniawan**

Saat ini berdomisili di Pamulang, Tangerang Selatan, dan telah bekerja sebagai di TEMPO sejak 8 tahun yang lalu. Ia bisa dihubungi melalui email [akbar.tempo@gmail.com](mailto:akbar.tempo@gmail.com).

# SAPI MINORITAS DI IBU KOTA

Dimuat Dalam Majalah Tempo, Edisi 4 – 10 Mei 2015

Oleh: **AKBARTRI KURNIAWAN**

*Sapi lokal kesulitan masuk Jabodetabek sejak pemerintah membuka keran impor sapi Australia. Mengandalkan konsumen loyal.*

**K**andang sapi lokal di rumah potong hewan Tapos, Depok, Jawa Barat, Jumat dua pekan lalu terlihat sepi. Hanya ada dua ekor sapi Bali yang terikat tali di kandang bagian depan berukuran sekitar 2.000 meter persegi itu. Sebaliknya, di bagian belakang, kandang dengan ukuran yang sama terlihat sesak oleh 70-an ekor sapi impor Australia.

Jumlah yang berbanding terbalik itu adalah gambaran populasi sapi lokal yang semakin terimpit oleh kedatangan sapi asal luar negeri di Jakarta dan sekitarnya. Marina Ratna Dwi Kusumajati, Direktur Utama PD Dharma Jaya, rumah potong hewan (RPH) milik pemerintah DKI Jakarta, mengatakan jumlah sapi lokal yang masuk ke RPH memang berangsur-angsur menyusut. "Saat ini 97 persen RPH di Jabodetabek diisi sapi impor," katanya Selasa dua pekan lalu.

Edy Wijayanta, peternak di Tapos, Depok, mengatakan sapi lokal kalah bersaing harga dengan sapi Australia. Di Jabodetabek, harga karkas (daging bercampur tulang) sapi impor dibanderol Rp 78 ribu per kilogram dari tangan jagal

(tukang menyembelih sapi). Sedangkan sapi lokal lebih tinggi, yaitu Rp 83 ribu per kilogram. Inilah yang membuat peternak tak berani mengirim sapi lokal ke rumah-rumah potong di sekitar Ibu Kota.

Peternak memilih menjual sapi lokal hanya jika ada permintaan dari jagal. Edy salah satu dari segelintir peternak di Jabodetabek yang masih rutin memasok sapi jenis ini. Pria 50 tahun asal Jepara, Jawa Tengah, ini memiliki stok 300 ekor sapi lokal di kandang bersebelahan dengan RPH Tapos yang dipasarkan secara *online*.

Mayoritas sapi milik Edy untuk menyuplai kebutuhan Idul Fitri dan Idul Adha, yang jatuh pada Juli dan September mendatang. Pada periode itu, kebutuhan sapi dipastikan meroket. Permintaan dari jagal rumah potong hewan Tapos rata-rata hanya dua ekor per pekan. Padahal RPH milik Pemerintah Kota Depok ini rata-rata memotong 40-50 ekor sapi setiap hari. Menurut Edy, permintaan sapi lokal biasanya datang dari konsumen yang fanatik. "Pedagang daging sapi lokal punya konsumen yang loyal."

Banjir sapi Australia ini terjadi akibat kuota impor yang melonjak tajam, dari 200 ribu ekor pada 2012 menjadi sekitar 600 ribu ekor pada 2014. Baru-baru ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Partogi Pangaribuan kembali mematok kuota impor sapi sebesar 270 ribu ekor pada kuartal kedua 2015. Volume ini meningkat dari realisasi impor kuartal pertama tahun ini sebanyak 97 ribu ekor.

**S**ulitnya sapi lokal masuk Jabodetabek diperparah oleh mahalannya ongkos logistik. Yuari Trantono, peneliti di Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian, mengatakan harga sapi lokal dari Nusa Tenggara

Timur dan Nusa Tenggara Barat sebenarnya masih lebih murah ketimbang sapi impor. Namun tingginya ongkos angkut dengan kapal dan truk membuat harganya bisa melangit saat tiba di Jakarta, melebihi harga sapi impor.

Yuari, yang pernah menggeluti bisnis perdagangan sapi selama satu dasawarsa, punya pengalaman pahit mengangkut sapi dari Kupang ke Jakarta. Dalam hitungannya, harga sapi lokal NTT dan NTB sebesar Rp 32-34 ribu per kilogram bobot hidup bisa meroket menjadi Rp 43 ribu setiba di Jakarta. Harga tersebut lebih mahal ketimbang sapi impor yang dibanderol Rp 38-40 ribu per kilogram bobot hidup. "Siapa yang berani mengambil rugi?" kata Yuari. Kenaikan harga berasal dari ongkos pengangkutan, pungutan liar, hingga risiko penyusutan bobot sapi (lihat infografis).

Akibatnya, pedagang sapi NTT dan NTB harus mengubur cita-cita mereka mengirim sapi ke Jabodetabek, yang mengkonsumsi 60 persen kebutuhan daging nasional. Pedagang sapi di sana memilih mengalihkan distribusi ke Kalimantan, yang harganya lebih baik ketimbang Jakarta (lihat tabel).

Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengetahui kendala tersebut. Itu sebabnya ia menandatangani kerja sama dengan pemerintah DKI Jakarta untuk jaminan suplai sapi ke Ibu Kota. Akan ada anggaran tersendiri untuk menanggung ongkos pengiriman yang menjadi biang kerok mahal biaya angkut. Ia juga menyiapkan 1.100 ekor sapi bibit dan 1.000 ekor sapi bakalan atau penggemukan. "Untuk memenuhi kebutuhan daging di Jakarta."

Lain lagi cerita Abu Hasan, 53 tahun, blantik atau makelar sapi asal Malang. Ia tidak lagi mengirim sapi ke Jakarta karena harga hewan itu meroket lebih dulu di Jawa Timur. Hasan,

yang biasanya mengangkut 23 ekor sapi setiap hari ke Jakarta, kini menghentikan bisnisnya. "Akibat membanjirnya sapi impor."

Tingginya konsumsi daging di Jabodetabek membuat pemasok di sentra produksi sapi di NTT, NTB, Jawa Timur, dan Jawa Tengah mengubah strategi. Mereka tidak lagi mengirim sapi hidup, tapi mengangkut daging beku. Tamadoy Thamrin, Direktur Utama PT Abbatoir Surya Jaya, rumah potong hewan di Surabaya, mengatakan ia mengirim lima ton daging beku saban minggu ke Jakarta.

Daging beku mengisi 15 persen pasar daging. Konsumen daging beku adalah pengelola hotel, restoran, katering, dan industri daging olahan. Harganya dibanderol lebih murah, Rp 60-70 ribu per kilogram.

Librato El Arif, Direktur Utama PT Berdikari, badan usaha milik negara khusus peternakan, juga melirik bisnis daging beku. Ia berancang-ancang menggenjot pasokan daging beku sapi dari NTT, NTB, dan Jawa. Mulai April lalu, ia mengirim 1,5 ton daging beku dan daging dingin (*chilled*) merek Tambora Beef dari Bima NTB ke beberapa supermarket di Jakarta.

Syukur Iwantoro, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, mulai mendorong industri rumah potong hewan mengemas daging sapi lokal menjadi daging beku dan dingin. Ini merupakan cara merebut pasar Jakarta dari serbuan daging sapi impor. Ia mengatakan pemerintah pusat mengucurkan dana Rp 8,7 miliar kepada pemerintah NTT untuk membangun dua rumah potong hewan modern di Kupang. "Nantinya sapi dari NTT berupa daging beku."

*Akbar Tri Kurniawan, Artika Rahmi (Surabaya), Eko Widiyanto (Malang), Rofiqi Hasan (Denpasar), Yohanes Seo (Kupang)*

## **TAHAPAN PENGIRIMAN SAPI DARI KUPANG, NTT, KE JABODETABEK**

### **KUPANG**

Membeli sapi 100 ekor. Bobot rata-rata 250 kilogram. <<>> Butuh waktu 14 hari



Pengurusan administrasi di Karantina Hewan. <<>> Butuh waktu tiga hari



Perjalanan dari Pelabuhan Tenau, Kupang, menuju Tanjung Perak, Surabaya. Sapi diberi makan jerami dua kali dan minum satu kali. <<>> Butuh waktu empat hari



### **SURABAYA**

Tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Bobot sapi susut 10 persen menjadi 225 kilogram. Masuk kandang pemulihan. <<>> Butuh waktu satu hari



Sapi diangkut dengan truk menuju Jabodetabek. Selama di perjalanan, risiko sapi mengalami patah kaki mengancam. <<<<>>>> Waktu perjalanan dua hari



Pungutan liar juga merajalela di Ngawi, Brebes, dan Cirebon, di antaranya dari aparat kepolisian serta petugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.



### **JAKARTA**

Sapi tiba di kawasan Jabodetabek dengan bobot susut sebesar 20 persen atau menjadi 200 kilogram.



Sebagian pedagang memilih memulihkan sapi dengan menambah air gula, hijauan, dan vitamin. Tujuannya untuk menekan bobot susut menjadi 13 persen saja. Bobot sapi menjadi 220 kilogram. <<>> Butuh waktu satu hari

### **BIAYA**

- Normal (tanpa pemulihan setiba di Jabodetabek): Rp 1,2 juta per ekor
- Tambahan gizi untuk menekan penyusutan bobot: Rp 100 ribu per ekor
- Asumsi tiga kali kena pungutan liar selama perjalanan Surabaya-Jakarta: Rp 150 ribu

### **KUOTA IMPOR SAPI 2015**

#### **Kuartal I:**

Sapi bakalan: 100.000 ekor

Realisasi: 97.700 ekor

#### **Kuartal II:**

Sapi bakalan 250 ribu ekor diberikan kepada 30 importir

Sapi potong 30 ribu ekor diberikan kepada 18 importir



**Agus Setiyanto**

Lahir di Tegal kini berdomisili di Pemalang dan menjadi Redaktur SatelitPost Purwokerto. Pernah menempuh pendidikan Fakultas Biologi di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Ia bisa dihubungi melalui email [satelit.agus@gmail.com](mailto:satelit.agus@gmail.com)

# MEREGANG NYAWA DI BAWAH POHON NIRA MENGGUGAT KETIDAKADILAN JURAGAN GULA KELAPA

Dimuat dalam SatelitPost, Tanggal 20 Maret 2016  
Oleh: **AGUS SETIYANTO**

*Setiap tahun ratusan pembuat gula kelapa (penderes) harus meregang nyawa saat menyadap nira. Juragan gula meraup miliaran rupiah dari bisnis gula ini. Sedangkan penderes masih saja tetap miskin. Mengapa bisa demikian?*

**G**ambaran itu bisa kita saksikan di Desa Gumelem Wetan. Masuk wilayah Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Luasnya 973.802 hektare, di mana 429 hektare berupa perkebunan kelapa. Desa ini merupakan dataran pegunungan berbukit-bukit dengan sudut kemiringan  $0^{\circ}$  s/d  $45^{\circ}$ . Ada 627 orang penderes laki-laki di desa ini. Aktivitas mereka dalam bahasa lokal disebut *ndewan*. Memanjat pohon kelapa, menyadap nira, dan mengolah nira menjadi gula kelapa adalah keahlian turun temurun yang diwarisi dari orangtua mereka masing-masing.

Menyadap nira dikerjakan pagi dan sore hari. Pagi hari mulai dari pukul 05.00 WIB sampai 09.00 WIB, sedangkan

sore hari pukul 15.00 WIB sampai 18.00 WIB. Kedisiplinan menyadap nira akan sangat mempengaruhi kualitas gula kelapa yang dihasilkan.

“*Esuk-esuk wis kudu nggawa pongkor, ora oleh kawanen* (Pagi-pagi sekali harus sudah membawa pongkor (tempat menaruh nira kelapa), tidak boleh kesiangan),” ujar Sujani (54), penderes, awal Maret lalu.

Penderes tidak punya hari libur. Jika absen, bunga kelapa (*manggar* atau *wala*) bisa mengering. Pada kondisi demikian *manggar* bisa selamanya tidak meneteskan nira (mati). Itu artinya penderes tidak punya bahan baku untuk membuat gula kelapa.

Kehidupan seorang penderes ditentukan oleh hasil gula yang mereka produksi. Semakin banyak gula, akan semakin banyak uang yang didapat dari juragan. Menurut Sujani, setiap hari masing-masing penderes mampu menghasilkan 5 Kg gula kelapa.

Sebagian besar penderes hanya tamat Sekolah Dasar (SD). Anak-anak merekapun demikian. Bahkan banyak yang harus putus sekolah karena alasan ekonomi. Anak-anak penderes yang putus sekolah biasanya memilih menjadi buruh di kebun kelapa sawit, pabrik, ataupun pembantu rumah tangga di Bandung dan Jakarta.

Sebagian besar penderes berusia di atas 30 tahun. Bahkan banyak yang sudah kakek-kakek berusia di atas 60 tahun. Penderes muda sangat jarang ditemui. Penderes melarang anak-anak mereka bernasib sama hidup sampai tua sebagai pembuat gula kelapa.

“Munculnya penderes muda bisa menjadi indikator perubahan kesejahteraan penderes. Selama belum ada penderes muda, itu artinya penderes masih belum

sejahtera,” ujar Sindu Dwi Hartanto MSi, penyuluh sekaligus pendamping penderes gula kelapa dari Lembaga Penelitian Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH) Purwokerto. Tiga tahun terakhir Sindu pulang pergi ke desa ini untuk membantu penderes keluar dari jerat kemiskinan.

Desa Gumelem Wetan sudah turun temurun memproduksi gula sengkang besar. Gula ini diproduksi dengan cetakan dari pohon bambu besar berdiameter 8 Cm. Namun, sejak tahun 2005 sampai sekarang penderes memproduksi gula bathokan dengan cetakan dari kayu yang ditatah setengah bola (bathok kelapa dibelah dua). Cetakan ini muncul karena adanya kebutuhan pasar yang menghendaki gula bathokan.

## **JURAGAN, SI PENENTU HARGA GULA KELAPA**

Penderes tidak pernah menjual gula kelapa secara langsung kepada konsumen di luar desa. Pemasaran dilakukan melalui pihak perantara yang dikenal sebagai *ayak*. Para *ayak* setiap hari berkeliling dari dusun ke dusun mengumpulkan gula kelapa buatan penderes.

Tapi *ayak* tidak pernah membeli gula itu dengan uang. *Ayak* hanya menukar gula kelapa itu dengan beras, sayur mayur, pakaian, dan perabotan rumah yang dibutuhkan penderes. Di sini *ayak* berkuasa penuh untuk menaksir nilai (harga) gula dan menentukan barang-barang apa yang sesuai untuk ditukar.

Setelah gula kelapa terkumpul dalam jumlah besar, *ayak* kemudian menjual gula- gula itu ke pasar. Di sana seorang *ayak* bisa sesuka hati menentukan harga jual gula kepada konsumen. Jadi, *ayak*-lah yang kemudian menikmati

keuntungan besar dari produksi gula milik penderes. Sementara penderes sampai kapanpun tidak tahu menahu tentang harga gula di pasaran.

Zaman bergerak maju. *Ayak-ayak* ini berkembang menjadi pedagang-pedagang besar atau pengepul gula kelapa (juragan). Mereka mampu membangun rumah penampung gula kelapa berkapasitas besar. Rumah penampung gula ini biasanya berada di lokasi strategis jalur turun gunung para penderes.

Ada juragan lokal dan juragan besar. Juragan lokal merupakan pengepul I (tingkat pertama) yang bertempat tinggal di dekat penderes (tetangga). Modal dan akses pasar mereka terbatas di desa dan kecamatan. Sedangkan juragan besar merupakan pengepul II (tingkat kedua) yang bermodal besar. Mereka menampung gula dalam skala industri untuk memenuhi pesanan pabrik kecap. Juragan besar memiliki jangkauan pasar sangat luas, bahkan sampai tingkat provinsi.

Juragan besar akan sekuat tenaga menghalangi siapapun merubah struktur perdagangan gula kelapa ini. Juragan akan marah bila mengetahui ada penderes yang berani menjual gula secara langsung ke pasar kecamatan.

At (64), penderes, menceritakan sejarah kelim praktik curang ini. Menurut dia sejak Orde Lama bisnis gula kelapa sudah dikuasai oleh kapitalis paling kaya di desa setempat. Juragan selalu melarang penderes menjual gula kelapa ke tempat lain. Bahkan, juragan besar kerap menggunakan tentara untuk mengintimidasi penderes. "Warga yang akan pergi ke pasar untuk menjual gula dirazia Taban (tentara bantuan) dari Koramil," ujar At, awal Maret lalu.

Praktik semacam ini sampai sekarang masih berlangsung. Hanya saja bentuknya lebih halus. Seorang juragan biasanya

rutin menawarkan dan memberi pinjaman uang kepada penderes. Di situ ada perjanjian tak tertulis: hutang harus dibayar dengan cara menyetorkan (menjual) gula kepada si juragan. Semakin sering dan banyak pinjaman, akan semakin sulit seorang penderes bisa lepas dari jerat juragan.

Sampai saat ini penderes tidak bisa berpaling dari juragan. Meski marah, mereka sadar hanya juraganlah yang bisa dan banyak membantu saat sedang membutuhkan uang dalam jumlah besar. Misalnya saat ada anggota keluarga yang sakit, butuh biaya sekolah anak, hajatan, dan setoran kredit motor.

Sejumlah juragan juga melakukan konsolidasi. Mereka melakukan pengawasan dan pengendalian jalur perdagangan gula kelapa. Mereka bersekutu untuk menghalangi siapapun membantu penderes dan merubah tata-tatanan lama perdagangan gula itu. "Dulu ada seorang penjual kayu mencoba mencarikan pasar (konsumen-red) kepada penderes, tapi digagalkan preman-preman yang kemungkinan suruhan para juragan," ujar At.

Sindu mengaku pernah melakukan penelitian untuk mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh juragan besar dari model bisnis di atas. Setiap bulan juragan besar di desa itu mampu meraup keuntungan paling sedikit Rp 16 juta. Dengan keuntungan

itu juragan dapat membeli truk untuk mengangkut gula kelapa ke berbagai daerah atau pabrik kecap.

"Setidaknya ada empat juragan di Gumelem Wetan. Tiap minggu masing-masing mampu menampung 4000 Kg gula dari penderes. Katakanlah mereka ambil untung Rp 1000 per Kg, tinggal dikalikan saja sebulan (empat minggu-red)," ujar Sindu.

Apa yang terjadi di Desa Gumelem Wetan Banjarnegara juga terjadi di Kabupaten Banyumas. Luthfi Makhasin, seorang Dosen Ilmu Politik Unsoed Purwokerto, yang lahir di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok, kecamatan terbesar produsen gula kelapa di Banyumas, menggambarkan relasi antara juragan dan penderes dengan jernih.

Juragan gula biasanya bertempat tinggal di pinggiran desa dan tersebar di empat penjuru mata angin. Dari posisi yang strategis itu mereka bisa menghalangi siapapun penderes yang akan menjual gula kelapa langsung ke pasar. Penderes sengaja dibuat rikuh (tidak enak hati) jika berani melewati rumah seorang juragan tanpa menjual gula kepadanya.

Hubungan antara juragan dan penderes sangat eksploitatif. Juragan bisa memaksa, menentukan harga, dan menilai kualitas gula milik penderes. Kebiasaan hutang menempatkan penderes dalam kedudukan sangat lemah, sehingga tidak berani menjual gula sendiri kepada selain juragan.

Juragan kemudian mengirim gula-gula itu kepada pengusaha gula di Kota Purwokerto. Pengusaha-pengusaha ini kemudian memasarkan ke konsumen. Sebagian masuk ke jaringan supermarket dan pasar modern, sebagian lain masuk ke pabrik makanan seperti Indofood atau Unilever. Ada juga yang masuk ke pasar ekspor Eropa dan Australia.

“Di Canberra gula kelapa kemasan 100 gram dihargai 3,5 dolar. Itu artinya, sekilo dihargai sekitar 200 ribu perak. Padahal penderes di Cilongok sudah sangat bersyukur jika gulanya dihargai Rp 5.000 per Kg,” ujar Lutfi, yang pada tahun 2009 menempuh pendidikan S2 di Australia, Rabu pekan lalu.

## **SEHARI MEMANJAT 35-40 POHON KELAPA**

Rabu 24 Februari 2016 jenazah Sardan ditemukan. Tubuh kakek 64 tahun itu tersangkut di sela-sela batu besar Sungai Deku Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

Sardan adalah penderes gula kelapa dari Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang, satu desa di kaki sebelah selatan Gunung Slamet. Sehari sebelumnya ia dikabarkan hilang saat pergi menyadap nira kelapa yang banyak tumbuh di kiri dan kanan sungai desa setempat.

Kapolsek Sumbang, AKP Supa'at menjelaskan, Sardan terjatuh dari pohon kelapa dan masuk ke Sungai Deku. Pohon kelapa yang licin serta kondisi fisik korban

diduga menjadi penyebab kecelakaan itu. "Jarak dari tempat *nderes* dengan ditemukannya korban sekitar 500 meter. Tinggi pohon kelapa 7 meter, sedangkan tinggi tebing Sungai Deku kira-kira 3 meteran," ujar Supa'at, Februari lalu.

Pukul 10.00 WIB jenazah Sardan langsung dibawa ke kantor kecamatan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga di RT 10 RW 02 Desa Kotayasa. Siang itu juga Sardan dikebumikan di pemakaman Desa Kotayasa.

Kejadian seperti di atas bukanlah yang pertama kali. Setiap tahun ada ratusan penderes jatuh dari pohon kelapa. Sebagian di antaranya tewas di tempat, lainnya harus menderita seumur hidup karena cacat permanen.

Misalnya menimpa Darsono (55) penderes gula kelapa dari Desa Darma, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Pada Minggu 23 Agustus 2015 ia ditemukan tewas di kebun kelapa saat sedang menyadap nira.

"Biasanya Darsono pulang saat azan Maghrib, tapi sampai pukul 19.00 WIB dia tak kunjung pulang. Korban ditemukan tergeletak di bawah pohon kelapa setinggi 7 meter. Ketika

dicek, korban ternyata sudah tidak bernyawa,” kata Kepala Sub Bagian Humas Polres Purbalingga, Inspektur Satu Diman, Agustus tahun lalu.

Ada juga Yasridi (70), seorang penderes dari Desa Kaliwangi Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas. Pada Sabtu 21 September 2015 kakek ini ditemukan tewas di bawah pohon kelapa. Seperti halnya Sardan, pohon yang licin serta usia diduga menjadi faktor penyebab kecelakaan ini.

Kecelakaan lainnya menimpa Kartawijaya (55) penderes dari Desa Majatengah Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga. Pada 7 Juli 2014 ia jatuh dari pohon kelapa setinggi 15 meter. Kartawijaya ditemukan tewas persis di bawah pohon kelapa keempat yang sore itu sedang ia ambil niranya.

H Fatikul Ikhsan SH M Hum, Kabag Kesra Setda Kabupaten Banyumas mengakui banyaknya kasus kecelakaan yang menimpa penderes. Pada tahun 2015 lalu tercatat 129 kasus kecelakaan. Sebanyak 28 di antaranya berujung pada kematian penderes.

“Dari 1 Januari sampai 16 Maret 2016 sudah 20 kasus kecelakaan yang dilaporkan kepada kami. Lima penderes tewas 15 lainnya cacat permanen,” ujar dia. Menurut Fatikul angka tersebut masih akan terus berubah. Dia juga tidak memungkiri bahwa kemungkinan masih ada kasus kecelakaan serupa, hanya saja tidak pernah dilaporkan.

Dugaan tersebut ternyata benar. Dari data 20 korban kasus kecelakaan yang sudah masuk ke meja Bupati Banyumas, di situ tidak tercantum nama Sardan penderes dari Desa Kotayasa Sumbang. Sardan ditemukan tewas pada Rabu 24 Februari 2016.

Menurut Fatikul, Bupati Banyumas selama ini rutin memberikan santunan kepada keluarga penderes. Keluarga penderes yang tewas mendapatkan Rp 5 juta, sedangkan yang cacat ataupun luka-luka antara Rp 7,5 sampai Rp 10 juta. Fatikul mengatakan santunan tersebut satu-satunya yang bisa dilakukan Pemkab untuk meringankan penderitaan penderes dan keluarganya.

“Itu bos gula (juragan-red) kalau tidak ada penderes bagaimana? Kan mitra, harusnya juga punya peran,” ujar Fatikul.

Sementara itu, di Kabupaten Purbalingga, terhitung sejak Desember 2015 sampai Februari 2016, tujuh orang penderes tewas akibat jatuh dari pohon kelapa. Enam orang lainnya menderita luka berat dan perlu perawatan intensif. Di kabupaten ini hampir setiap tahun lebih dari 20 penderes kehilangan nyawa setelah terjatuh dari pohon kelapa.

Windu Hartono, Kepala Sub Bagian Bina Sosial pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga, Rabu 16 Maret 2016, mengatakan, pada tahun 2014 lalu terjadi 56 kasus kecelakaan penderes. Sebanyak 29 penderes tewas, lima cacat, dan 20 lainnya luka berat. Sedangkan pada tahun 2015 tercatat 50 kejadian kecelakaan, 23 orang di antaranya tewas dan selebihnya luka berat.

Kecelakaan kerja penderes terjadi di hampir seluruh kecamatan. Angka kecelakaan tertinggi terjadi di kawasan sentra gula kelapa seperti Kecamatan Karanganyar, Bojongsari, Kutasari, dan Kaligondang.

“Pemkab Purbalingga memberikan bantuan masing-masing sebesar Rp 5 juta untuk keluarga yang ditinggalkan dan bantuan Rp 1 juta untuk pengobatan bagi petani penderes yang mengalami luka berat,” katanya, Rabu pekan lalu.

Sukhwanto, Kepala Seksi Industri Agrobisnis di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Dinperindagkop) Purbalingga, menyatakan ada 18 ribu penderes di Purbalingga. Mereka setiap hari, pagi dan sore, harus memanjat 35 sampai 40 pohon kelapa. Masing-masing pohon tingginya 10-12 meter.

Saat ini harga gula kelapa cetak di tingkatan penderes berkisar Rp 12 ribu sampai Rp 13 ribu. Harga itu menurut Sukhwanto masih belum sebanding dengan risiko dan ongkos produksi yang dikeluarkan masing-masing penderes.

“Harga itu didapat dari rantai pemasaran yang masih terlalu panjang. Andai saja kita bisa memotongnya, mungkin penderes kita akan bisa menikmati manisnya dollar karena gulanya dibeli langsung oleh *user* di pasar ekspor,” kata Sukhwanto.

Mistri, pengepul gula kelapa di Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga mengakui, gula kelapa sampai saat ini masih belum mampu menyejahterahkan para penderes. Meskipun tingkat produksi gula cukup tinggi, penghasilannya belum bisa untuk menutup ongkos produksi. Apalagi sampai

sekarang para penderes masih gemar berhutang. “Cuma cukup untuk hidup gali lubang tutup lubang,” ujarnya, Rabu pekan lalu.

Dia sangat berharap pemerintah daerah membekali penderes maupun pengepul gula kelapa kemampuan penguasaan teknologi informasi. Saat ini, kata dia, baru beberapa saja penderes yang sudah mampu memasarkan gula lewat internet. Mayoritas penderes masih mengandalkan juragan atau pengepul.

Kepala Seksi Industri Pertanian dan Kehutanan

Dinperindagkop Kabupaten Banyumas, Sri Gito, menyatakan ada 27 ribu penderes di Banyumas. Setiap hari mereka mampu memproduksi 250 ton gula kelapa. Gula kelapa ini terdiri dari dua jenis: cetak dan semut (kristal). Harga gula cetak di kisaran Rp 12 sampai 14 ribu, sedangkan gula kristal di kisaran Rp 17 ribu sampai 18 ribu.

Sri Gito mengklaim produksi gula kelapa di Banyumas merupakan yang terbesar di dunia. Dengan jumlah produksi sebanyak itu dia yakin Banyumas akan menjadi lumbung gula kelapa nasional. Dia berharap para penderes terus menjaga kualitas produksinya agar gula tersebut laku di pasar dunia.

“Produksi di bawah 5 Kg adalah penderes kecil, 6 sampai 9 Kg penderes menengah, dan lebih dari 10 Kg per hari adalah penderes besar. Penderes kecil ini memang masih belum sejahtera, tapi jumlahnya hanya 20 persen dari total semua penderes (27 ribu-red),” ujar Sri Gito.



# KATEGORI FOTO

## NOMINASI:

<b>Memanen Kacang Hijau</b> .....	107
Karya: Raditya Mahendra Yasa	
<b>Memanfaatkan Tepi Waduk Wadas Lintas</b> .....	109
Karya: Anis Efizudin	
<b>Solat Minta Hujan</b> .....	111
Karya: Sofan Kurniawan	
<b>Stok Pangan</b> .....	113
Karya: Maman Sukirman	
<b>Manfaatkan Lahan Di Pinggir Danau</b> .....	115
Karya: Arifin Al Alamudi	
<b>Mencari Oase Di tengah Kekeringan</b> .....	117
Karya: Masyudi Firmansyah	
<b>Menjemur Ebi</b> .....	119
Karya: Masyudi Firmansyah	
<b>Seren Taun Sindangbarang</b> .....	121
Karya: Feri Latief	
<b>Lahan Pertanian Makin Berkurang</b> .....	123
Karya: Arif Nugroho	
<b>Kampanye Makanan Tradisional</b> .....	125
Karya: Irsan Mulyadi	

## PEMENANG TERBAIK:

### **Memanen Kacang Hijau**

Karya: Raditya Mahendra Yasa – Harian Kompas Biro Jateng



**Raditya Mahendra Yasa**

Mulai bergabung dengan harian Kompas 2007 sebagai pewarta foto. Pernah ditugaskan dalam peliputan dalam dan luar negeri serta sejumlah peristiwa dan bencana di beberapa tempat di Indonesia. Mendapatkan beberapa penghargaan nasional dan internasional antara lain Anugerah Pewarta Indonesia, Wan-Ifra dan AJI Award.



## MEMANEN KACANG HIJAU

Oleh: **RADITYA MAHENDRA YASA**

dimuat dalam Harian Kompas pada 17 Oktober 2015

Petani memanen kacang hijau dengan latar belakang kawasan pabrik di Desa Ketitang, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Jumat (16/10). Rencana tata ruang dan wilayah yang jelas dapat mengendalikan alih fungsi lahan tanpa mengganggu ketahanan pangan



**Anis Efizudin**

Jurnalis yang berdomisili di Temanggung, Jawa Tengah. Menjadi pewarta foto di Antara. Bisa dihubungi melalui email [anizudin78@gmail.com](mailto:anizudin78@gmail.com)



## MEMANFAATKAN TEPI WADUK WADAS LINTAS

Oleh: **ANIS EFIZUDIN**

dimuat dalam Antara Foto, pada 7 Desember 2015

Sejumlah petani mengolah sawah untuk ditanami padi di tepi Waduk Wadas Lintang, Wonosobo, Jateng, Senin (7/12). Saat air Waduk Wadas Lintang surut seperti saat ini warga setempat memanfaatkan lahan di tepi waduk untuk bercocok tanam.



**Sofan Kurniawan**  
Fotografer Jawapos Radar Mojokerto



## SOLAT MINTA HUJAN

Oleh: **SOFAN KURNIAWAN**

dimuat dalam Jawa Pos Radar Mojokerto pada 19 Agustus 2015

Dua orang petani melakukan aktifitas di lahan jagung di atas Tambang Galian pasir batu di desa Padi Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto (28/11/2013), terdapat ratusan hektar lahan pertanian yang rusak akibat eksplorasi tambang galian pasir batu di wilayah tersebut, pemerintah setempat dinilai belum maksimal dalam mengeluarkan peraturan eksploitasi tambang, selain mengurangi lahan produktif kegiatan tambang pasir batu tersebut juga dapat memicu terjadinya bencana alam seperti longsor dan banjir.



**Maman Sukirman**

Lahir di di Sebatik, Kalimantan Utara. Belajar fotografi saat aktif di organisasi penerbitan kampus identitas Unhas dan UKM Fotografi Unhas tahun 2004. Saat ini bekerja di harian koran Sindo Makassar sejak tahun 2007. Ia dapat dihubungi melalui email rahmt01@gmail.com.



## STOK PANGAN

Oleh: **MAMAN SUKIRMAN**

dimuat dalam Koran Sindo pada 20 Oktober 2015

Petani melakukan panen gabah di tengah persawahan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, (20/10/2015). Provinsi Sulawesi Selatan mengirim beras untuk memenuhi kebutuhan empat provinsi yaitu DKI Jakarta, Maluku, Kepulauan Riau, dan Riau, untuk menjamin ketersediaan stok pangan beras bagi provinsi penerima.



**Arifin Al Alamudi**

Jurnalis yang berdomisili di Medan, mulai bekerja di Harian Tribun Medan sejak Juni 2010. Kini menduduki posisi asisten redaktur. Ia bisa dihubungi melalui email [arifin\\_tribun2010@yahoo.com](mailto:arifin_tribun2010@yahoo.com).



## MANFAATKAN LAHAN DI PINGGIR DANAU

Oleh: **ARIFIN AL ALAMUDI**

dimuat dalam Harian Tribun Medan pada 20 Maret 2016

Seorang petani di Kecamatan Pangururan, Samsir, Sumut, melepaskan jaring yang menyelubungi tanaman padi yang sudah menguning sebelum dipanen, Jumat (18/3/2016). Di kabupaten ini, masyarakat memanfaatkan lahan kosong di pinggiran Danau Toba untuk menanam padi.



**Masyudi Firmansyah**

Jurnalists yang berdomisili di Makassar. Saat ini katif menjadi fotografer Majalah Makassar Terkini. Ia bisa dihubungi melalui email [masyudinho@gmail.com](mailto:masyudinho@gmail.com).



## MENCARI OASE DI TENGAH KEKERINGAN

Oleh: **MASYUDI FIRMANSYAH**

dimuat dalam Majalah Makassar Terkini pada November 2015

Warga di desa Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, berjalan kaki berkilo-kilo meter untuk mendapatkan air bersih. Desa Bontoa salah satu daerah di Sulsel yang krisis air bersih saat musim kemarau. Desanya yang berada di pesisir pantai kabupaten Maros, makin membuat gersang daerah ini.



**Masyudi Firmansyah**

Jurnalists yang berdomisili di Makassar. Saat ini katif menjadi fotografer Majalah Makassar Terkini. Ia bisa dihubungi melalui email [masyudinho@gmail.com](mailto:masyudinho@gmail.com).



## MENJEMUR EBI

Oleh: **MASYUDI FIRMANSYAH**

dimuat dalam Majalah Makassar Terkini Januari 2015

Seorang warga di desa nelayan Manggar, Balikpapan, Kalimantan Timur, menjemur udang kering atau Ebi di depan rumahnya, Ebi yang dapat diolah menjadi bahan makanan atau bumbu dapur khas Indonesia, seperti terasi dll. Di desa nelayan Manggar, 90% warganya berprofesi sebagai nelayan dan pembuat ikan kering dan ebi, karena sulitnya menanam padi dan tanaman lainnya di pesisir pantai Balikpapan.



**Feri Latief**

Fotografer lepas dan menjadi kontributor untuk National Geographic Indonesia. Ia telah memenangkan beberapa penghargaan dan beasiswa untuk karya-karya fotonya. Feri bisa dihubungi melalui email [feri.latief@gmail.com](mailto:feri.latief@gmail.com).



## SEREN TAUN SINDANGBARANG

Oleh: **FERI LATIEF**

dimuat dalam National Geographic Indonesia pada Mei 2015

Masyarakat Sindangbarang, Bogor, memikul hasil panen menuju lumbung saat upacara Seren Taun. Penanaman bibit padi lokal secara terus-menerus oleh petani telah berhasil melestarikan benih tersebut.



**Arif Nugroho**

Lahir di demak kini berdomisili di Semarang dan menjadi jurnalis Koran Sindo edisi Jateng dan DIY. Pernah menempuh pendidikan Komunikasi di Universitas Diponegoro. Dia bisa dihubungi melalui email [slamsedi@yahoo.co.id](mailto:slamsedi@yahoo.co.id)



## LAHAN PERTANIAN MAKIN BERKURANG

Oleh: **ARIF NUGROHO**

dimuat dalam Koran Sindo pada 19 Maret 2016

Petani memeriksa lahan sawah tanaman padi di Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari yang barusaja dipanen, kemarin. Data pada Dinas Pertanian menyebutkan luasan lahan pertanian di wilayah Kota Semarang tiap tahunnya berkurang antara 5-10% akibat alih fungsi lahan.



**Irsan Mulyadi**

Jurnalis yang berdomisili di Medan, menjadi pewarta foto Antara sejak tahun 2009 hingga sekarang. Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara tahun 2003. Ia juga telah menjuarai berbagai penghargaan dan perlombaan foto jurnalistik, yang terbaru mendapatkan penghargaan Photo of the Year anugerah PFI tahun 2013, Foto terbaik Antara Foto 2014, dll. Irsan bisa dihubungi melalui email [irsanmulyadiphoto@gmail.com](mailto:irsanmulyadiphoto@gmail.com).



## KAMPANYE MAKANAN TRADISIONAL

Oleh: **IRSAN MULYADI**  
dimuat dalam Antara pada 5 Maret 2016

Aktivist Boemi Poetra membagikan dodol kepada pengguna jalan, ketika melakukan kampanye Peduli makanan tradisional, di Medan, Sumatera Utara, Jumat (4/3). Aksi tersebut untuk mengajak masyarakat agar tidak meninggalkan makanan tradisional.